



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id>



IG : [dinassosialkotim](#)



[dinassosialkotim](#)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten



Kotawaringin Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sampit, Februari 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PAWIANAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198911 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	20
E. Landasan Hukum	21
F. Sistematika	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	30
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran	76
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	85
D. Evaluasi Kinerja	93
E. Akuntabilitas Keuangan	93
BAB IV PENUTUP	94
LAMPIRAN	98



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran untuk publik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2023.

Hasil capaian pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran dan 7 Indikator yang telah ditetapkan adalah atau dikategorikan berhasil, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam mencapai kinerja tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 10.635.981.141,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 9.405.538.641,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.230.442.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.165.604.671,- atau capaian realisasi 76.77%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 oleh segenap unit bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur akan terus berupaya mengatasi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang.



BAB I PENDAHULUAN

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan



penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Soisal Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Soisal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Berdarkan Peraturan Peundang-Undangan Nomor 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penangan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, ekspliotasi dan diskriminasi.





B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur atas penggunaan anggaran. Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebagai berikut.

1.1. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;



- c. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- i. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Sosial;
- j. Melaksanakan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Sosial;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai uraian tugas :



- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi dinas sosial.

1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Kesekretariatan meliputi fungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Dinas Sosial. Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Umum dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga dinas;



- d. Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pembinaan pegawai dan tenaga fungsional ;
- f. Pembinaan kegiatan KORPRI Unit Dinas Sosial;
- g. Penyelenggara urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi sekretariat;
- i. Pengawasan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan fungsi, sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan rencana kerja Sekretariat Dinas Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial;
- c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
- d. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penataan organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tatausaha di lingkungan Dinas Sosial;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial;
- i. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Dinas Sosial;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;



- k. Mengoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas Sosial;
- l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Sosial;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Pengelolaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
- d. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
- e. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan usulan pengangkatan pns, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;



- h. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- i. Penyiapan bahan pembinaan pns;
- j. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (spm);
- k. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop);
- l. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- n. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
- b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
- d. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
- e. Memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran;
- f. Menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh



- acara dapat berjalan lancar;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - h. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
 - l. Mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;
 - m. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
 - n. Membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Pelaporan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
 - o. Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan Usul Kenaikan Pangkat, Daftar Urut Kepangkatan, Karis/Karsu, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun pegawai Pegawai Negeri Sipil;
 - p. Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - q. Menghimpun bahan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - r. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - s. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpul;
 - t. pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;



- u. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- v. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- x. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan surat perintah membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) dan perjanjian kinerja;
- g. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA); dan
- h. Penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA).



Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
- b. membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan sistem akuntansi instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- k. memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- l. menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- m. membuat saran pertimbangan di Bidang Keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- n. membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- o. mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- p. mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran bersama



- unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
- q. menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;
 - r. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - s. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - t. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - u. memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan Sub bagian Keuangan dan Perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - v. menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
 - w. melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
 - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan



sosial;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;



- j. Saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas fungsi bidang Pemberdayaan Sosial serta penanganan fakir miskin;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta



pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Untuk melaksanakan fungsi, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;



- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi Sosial; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi





Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Orang PNS dan 15 (Lima Belas) Orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak

NO	JABATAN	PNS	TENAGA KONTRAK
1	KEPALA DINAS	1	-
2	SEKRETARIS DINAS	1	-
3	KEPALA BIDANG	3	-
4	KEPALA SUB BAGIAN	2	-
5	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	9	-
6	PELAKSANA/ STAF	10	15
JUMLAH		41	

Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata-2 (S-2)	4
2	Strata-1 (S-1)	12
3	Diploma-IV (D-IV)	4
4	Diploma-III (D-III)	1
5	SLTA	5
JUMLAH		26



Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/ Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/E	0
2	Pembina Utama Madya	IV/D	0
3	Pembina Utama Muda	IV/C	1
4	Pembina Tingkat I	IV/B	1
5	Pembina	IV/A	3
6	Penata Tingkat I	III/D	7
7	Penata	III/C	3
8	Penata Muda Tingkat I	III/B	1
9	Penata Muda	III/A	9
10	Pengatur Tingkat I	II/D	1
11	Pengatur	II/C	0
12	Pengatur Mudaa Tingkat I	II/B	0
13	Pengatur Muda	II/A	0
JUMLAH			26

D. Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan perlindungan sosial kelompok masyarakat rentan dan penduduk miskin;
2. Kontribusi anggaran yang belum seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga diperlukan kebijakan khusus yang mengarah pada keseimbangan pendanaan sehingga program program bisa berjalan dengan maksimal;
3. Perbedaan nomenklatur instansi sosial pada kabupaten kota yang menyebabkan pelayanan menjadi lebih sempit karena dukungan anggaran terbagi dengan sektor lain;
4. Proses rotasi yang cukup cepat di kabupaten/kota sehingga keberlanjutan program menjadi terganggu karena proses tersebut tidak disertai dengan regenerasi yang matang dalam perpindahan kekuasaan dalam organisasi;
5. Masih Lemahnya SDM Pengelola Data.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sesuai ekspektasi masyarakat sebagai berikut :

1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berupa Bantuan Kelompok Usaha Bersama;
2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Keluarga berupa Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
3. Fasilitasi pemenuhan bantuan berupa alat bantu monilitas bagi Penyandang Disabilitas.



E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;



E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 adalah :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG
MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

-  Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
-  Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
-  Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
-  Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*)
-  Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya



Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 di atas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan terkait pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari misi ke-3 di atas, Dinas Sosial secara langsung berkaitan dengan sasaran strategis daerah yaitu *“Menguatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”*.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	91,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	94,99	94,99
			Persentase PMKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	95,05	95,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	94,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan	70,91	75,91	80,91	85,91	95,91	95,91

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN	
					DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1.	Persentase PSKS yang di berdayakan	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.2	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	%	$\frac{\text{Jumlah OT yang dipulangkan}}{\text{Jumlah OT terdata pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.3	Persentase PMKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.4	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.5	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	%	$\frac{\text{Jumlah anggota TAGANA yang tersedia}}{\text{Jumlah ketersediaan anggota TAGANA ditargetkan}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.6	Persentase Taman Makam Pahlawan	%	$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023



B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatka Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	73,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	%	79,93
			Persentase PMKS yang tertangani	%	80,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	83,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	%	58,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan	%	80,91
2	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah	MeningkatnyK ualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 05 bulan Januari Tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kotawaringin Timur Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	73,37
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	79,93
		1.3	Presentase PMKS yang tertangani	80,05
		1.4	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	83,59
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	58,07
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	80,91
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Bulan Oktober 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran serta adanya anggaran perubahan/ pergeseran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023 (Perubahan)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	97
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90
		1.3	Presentase PMKS yang tertangani	95
		1.4	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2023



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur :

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang diberdayakan	97	Rp 260,870,000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	117	Rp 260,870,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	17	Rp 120,870,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	100	Rp 140,000,000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	Rp 62,500,000
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	100	Rp 62,500,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	100	Rp 62,500,000



PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani	95	Rp	455,522,744
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	197	Rp	236,160,000
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	40	Rp	50,100,000
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yg mendapatkan bantuan alat dengar, kursi roda dan kruk	22	Rp	70,000,000
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti yang didata dan dibina	40	Rp	24,400,000
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Yg keluarganya diberikan bimbingan sosial	20	Rp	23,470,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	22	Rp	2,800,000



Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	15	Rp	13,740,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	38	Rp	51,650,000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	75	Rp	219,362,744
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia yang dibantu kebutuhan logistik permakanan	40	Rp	69,850,000
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang dipulangkan dipertemukan dengan keluarganya	15	Rp	49,040,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan biaya pengobatan untuk layanan rujukan	20	Rp	100,472,744
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84	Rp	2,163,180,800
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	20	Rp	10,940,000
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	20	Rp	10,940,000



Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	751	Rp	2,152,240,800
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang dihimpun	17	Rp	832,810,000
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	200	Rp	35,529,600
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKH yang diberdayakan	48	Rp	26,991,200
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK yang dibantu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	486	Rp	1,256,910,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98	Rp	368,773,100
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	65	Rp	199,318,100
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana alam/sosial yang diberikan bantuan	65	Rp	199,318,100
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	40	Rp	169,455,000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	40	Rp	169,455,000
PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99	Rp	169,995,850
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2	Rp	169,995,850
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2	Rp	169,995,850



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	Rp	6,909,138,647
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	14	Rp	146,515,400
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	Rp	114,020,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	Rp	32,495,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		Rp	4,147,089,786
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	14	Rp	3,980,429,786
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	13	Rp	166,660,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana		Rp	178,409,700
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya penyediaan jumlah Pakaian Olahraga, Atribut Pakaian Dinas dan Baju Daerah disediakan/dibeli	43	Rp	50,379,700



Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	Rp	128,030,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		Rp	521,718,950
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli tiap tahun	12	Rp	12,004,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	10	Rp	177,661,400
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli tiap Tahun	12	Rp	15,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Logistik lainnya yang disediakan dalam 1 Tahun	12	Rp	41,255,550
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	50000	Rp	21,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	Rp	7,488,000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Tamu per tahun	3	Rp	69,610,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	50	Rp	177,700,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana		Rp	1,079,380,000



Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor yang di beli	2	Rp	60,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeller yang di beli	16	Rp	105,130,000
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab	1	Rp	847,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung yang disediakan	5	Rp	67,250,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Rp	502,144,911
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	12	Rp	3,000,000
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar kantor per tahun	12	Rp	76,986,860
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	15	Rp	422,158,051
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		Rp	333,879,900
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan tertib bayar pajak	7	Rp	177,860,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dan dipenuhi BBM nya	12	Rp	46,394,900
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	12	Rp	18,640,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	292	Rp	90,985,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 Sesuai Perubahan Target Dalam Perjanjian Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh



berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam



mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	97	98.29	101.33	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	89.00	98.89	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.3	Presentase PMKS yang tertangani	95	91.94	96.77	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.4	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84	80.40	95.71	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98	95	96.94	Sangat Tinggi	Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99	100	101.01	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Soisal dan Penanganan Fakir Miskin
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.1

“Persentase PSKS yang diberdayakan”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 98% dari 97% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 101.33% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.1

1. Realisasi target Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tahun 2023 sebanyak 15 Orang dari 17 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 88,24% (Kategori Tinggi)
2. Realisasi target Karang Taruna pada tahun 2023 sebanyak 100 Orang dari 100 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PSKS yang diberdayakan sebanyak 115 Orang dari 117 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 98,29%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$$

$$\frac{115}{117} \times 100\% = \mathbf{98,29\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{98,29}{97} \times 100 = \mathbf{101,33\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.2

“Persentase Warga Migran Yang Di Pulangkan”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 89% dari 90% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 98.89% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.2

1. Realisasi target warga negara migran yang dipulangkan / orang terlantar yang dipulangkan pada tahun 2023 sebanyak 89 Orang dari 100 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 89% (Kategori Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah warga negara migran yang dipulangkan sebanyak 89 Orang dari 100 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 89%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah OT yang dipulangkan}}{\text{Jumlah OT pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

$$\frac{89}{100} \times 100\% = \mathbf{89\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan terget pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{89}{90} \times 100 = \mathbf{98.89\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.3

“Persentase PMKS Yang Tertangani”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 91.94% dari 95% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 96.77% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.3

1. Realisasi target PMKS yang tertangani dalam Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 sebanyak 183 Orang dari 163 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 89,07% (Kategori Tinggi)
2. Realisasi target PMKS yang tertangani dengan memperoleh bantuan bencana alam/sosial pada tahun 2023 sebanyak 65 Orang dari 65 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 228 Orang dari 248 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 91.94%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

$$\frac{228}{248} \times 100\% = \mathbf{91.94\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{91.94}{95} \times 100 = \mathbf{96.77\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.4

“Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 84.40% dari 84% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 95.71% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.4

1. Realisasi target PMKS memperoleh bantuan bencana alam/ sosial pada tahun 2023 sebanyak 65 Orang dari 65 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
2. Realisasi target PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Permakanan pada tahun 2023 sebanyak 40 Orang dari 40 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
3. Realisasi target PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Sandang pada tahun 2023 sebanyak 40 Orang dari 40 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
4. Realisasi target PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Alat Bantu pada tahun 2023 sebanyak 22 Orang dari 22 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
5. Realisasi target PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produtif (UEP) pada tahun 2023 sebanyak 358 Orang dari 486 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 73.66% (Kategori Sedang)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 525 Orang dari 623 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 80.40%.



Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$$

$$\frac{525}{623} \times 100\% = \mathbf{80.40\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{80.40}{84} \times 100 = \mathbf{95.71\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.5

“Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 95% dari 98% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 96.94% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.5

1. Realisasi target ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada tahun 2023 sebanyak 38 Orang dari 40 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 95% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 38 Orang dari 40 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 95%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah anggota TAGANA yang tersedia}}{\text{Jumlah ketersediaan anggota TAGANA ditargetkan}} \times 100\%$$

$$\frac{38}{40} \times 100\% = 95\%$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{95}{98} \times 100 = 96.94\%$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.6

“Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari 99% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 101.01% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.6

1. Realisasi target Taman Makam Pahlawan yang terpelihara sebanyak 2 TMP dari 2 TMP yang ada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah TMP yang terpelihara sebanyak 2 TMP dari 2 TMP sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{100}{99} \times 100 = \mathbf{101.01\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 2

“Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah”

INDIKATOR 2.1

“Persentase Tingkat Pemenuhan Komponen Penunjang Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan Perundangan”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 2.1

1. Realisasi target fisik program/kegiatan sekretariat sebesar 100 dari 100 sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi).

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Realisasi capaian fisik komponen penunjang perangkat daerah}}{\text{Target Capaian}} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	61.37	100	163%	67.37	99.15	147%	97	98.29	101%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	69.93	0	0%	74.93	100	133%	90	89.00	99%
		Presentase PMKS yang tertangani	70.05	100	143%	75.05	156	208%	95	91.94	97%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	73.59	110	149%	78.59	166	211%	84	80.40	96%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	34.07	105	308%	46.07	80	174%	98	95	97%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70.91	100	141%	75.91	100	132%	99	100	101%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%



Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang diberdayakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di Kecamatan Pulau Hanut dan Kecamatan Telaga Antang tidak ada (meninggal dunia) sehingga dilakukan seleksi kembali untuk mengisi posisi TKSK tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase Warga Negara Migran Yang Dipulangkan Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa oknum yang mengaku terlantar akan tetapi masih belum masuk sebagai kriteria warga migran yang bisa dipulangkan ke daerah asal serta sudah terpenuhinya pemulangan warga migran untuk dipulangkan ke daerah asalnya sampai Triwulan IV.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang tertangani Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. PMKS yang ditangani yaitu PMKS yang memerlukan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Korban Bencana Alam/Sosial. Terjadinya kenaikan realisasi dari 2021 ke 2022 disebabkan banyaknya penanganan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, kebakaran rumah dan banjir. Kemudian terjadi penurunan realisasi kembali pada tahun 2023 karena hanya penanganan peristiwa kebakaran rumah.



Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Terjadinya kenaikan realisasi dari 2021 ke 2022 karena adanya peningkatan PMKS yang menerima bantuan sosial seperti disebabkan banyaknya masyarakat yang menerima dampak dari pandemi Covid-19, korban bencana banjir dan kebakaran rumah serta KPM yang menerima bantuan KUBE dan UEP serta bantuan sosial berupa Alat Bantu dan Permakanan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan, artinya berkurangnya PMKS yang mendapatkan bantuan sosial.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya anggota TAGANA yang mengundurkan diri kemudian dilakukan seleksi kembali untuk penambahan anggota TAGANA pada tahun 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya stabil yaitu 100%. Terdapat 2 (dua) Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur berlokasi di Jalan Jendral Sudirman KM. 8 Sampit dan di Jalan Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.



Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah” dengan indikator kinerja Persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai perundangan Tahun 2023 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya stabil yaitu 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL RENSTRA 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	61.37	98.29	91.37	108%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	69.93	89.00	94.99	94%
		Presentase PMKS yang tertangani	70.05	91.94	95.05	97%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	73.59	80.40	93.59	86%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	34.07	95.00	94.07	101%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70.91	100.00	91.91	109%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100.00	100	100%



Berdasarkan penyajian data Tabel 3.4 maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PSKS yang diberdayakan pada tahun 2023 telah mencapai 108% dengan kategori **“Baik”**.
2. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase Warga Migran Yang dipulangkan pada tahun 2023 telah mencapai 94% dengan kategori **“Baik”**.
3. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2023 telah mencapai 97% dengan kategori **“Baik”**.
4. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2023 telah mencapai 86% dengan kategori **“Baik”**.
5. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase ketersediaan tegana terampil TAGANA pada tahun 2023 telah mencapai 101% dengan kategori **“Baik”**.
6. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara pada tahun 2023 telah mencapai 109% dengan kategori **“Baik”**.
7. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah” dengan Persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan pada tahun 2023 telah mencapai 100% dengan kategori **“Baik”**.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97	98.29	101.33
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	89.00	98.89
		Presentase PMKS yang tertangani	95	91.94	96.77
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84	80.40	95.71
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98	95	96.94
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99	100	101.01
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100

Interpretasi Hasil Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Hambatan dan Solusi/Upaya yang dilakukan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PSKS yang Diberdayakan”

Realisasi capaian persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 98,29% dari yang ditargetkan 97% yaitu sebesar 101,33%. Semakin tingginya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka semakin tinggi usaha PSKS dalam melaksanakan pendampingan sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial.



Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Permensos No.8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

Partisipasi PSKS dalam penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilihat dari keaktifan dan kontribusinya. Pada Tahun 2023 Capaian partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial melebihi dari yang ditargetkan, yaitu tercapai 101,33 %. PSKS yang aktif dalam mendampingi dan memberikan pelayanan ke PMKS antara lain TKSK, PKH dan Karang Taruna. Dengan adanya peningkatan jumlah PSKS ini maka semakin tinggi usaha Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dalam meningkatkan partisipasi PSKS bersama dengan pendamping sosial lainnya dalam usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara PSKS dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, pihak desa serta pihak terkait lainnya dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Adanya semangat dan motivasi dari para PSKS sendiri untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terjadi pergantian PSKS di masa tahun berjalan, mengundurkan diri sebagai PSKS dikarenakan kesibukan pekerjaan, pindah kota atau alamat tinggal sehingga mempengaruhi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Masih belum maksimalnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi para PSKS.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Membuat komitmen berupa perjanjian kerja sebelum memulai menjadi PSKS dalam hal ini (SDM PKH, TKSK dan Karang Taruna) dengan masa kerja beberapa tahun;
2. Meningkatkan kualitas PSKS melalui pembinaan dan pelatihan penilaian kompetensi dan kapasitas PSKS;

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Warga Migran Yang Dipulangkan”

Realisasi capaian persentase partisipasi PPKS yang merupakan orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal adalah sebesar 89 % dari yang ditargetkan 90% yaitu sebesar 98,89 %. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan penanganan dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk PMKS tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya.

Orang Terlantar adalah seseorang, keluarga, kelompok warga negara yang karena alasan ideologis, politis, ekonomi dan sosial budaya mengalami keterlantaran baik dalam negeri dan yang ada diluar negeri dan berkeinginan untuk kembali ke tempat asalnya namun tidak memiliki daya dan kemampuan. Orang terlantar dikelompokkan sebagai salah satu bencana sosial yang memiliki kriteria tidak dapat diramalkan sebelumnya karena bersifat mendadak, tidak terencana dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Dalam penanganan Orang Terlantar sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 berisikan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang harus terfokus, terpadu dan berkelanjutan”.

Pada Tahun 2023 Capaian warga negara migran yang dipulangkan/ orang terlantar yaitu tercapai 90%. Berdasarkan kondisi lapangan, pemohon harus



memenuhi beberapa persyaratan dan pemeriksaan untuk menentukan apakah pemulangan ke daerah asal disetujui/tidak.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Tersedianya shelter/ Rumah Singgah sebagai tempat sementara Orang Terlantar yang akan dipulangkan;

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Masih belum optimalnya dalam penjagaan atau keamanan khusus di Rumah Singgah dalam menangani Orang Terlantar (OT) terutama pada saat diluar jam kerja;
2. Terbatasnya anggaran untuk pemulangan Orang Terlantar (OT).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Menyediakan SDM khusus untuk menjaga di Rumah Singgah sehingga mempercepat penanganan, tidak hanya untuk Orang Terlantar saja akan tetapi PMKS lainnya yang ada di Rumah Singgah.
2. Penyesuaian anggaran agar pemulangan Orang Terlantar (OT) dapat difasilitasi.

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PMKS yang Tertangani”

Realisasi capaian persentase PMKS yang tertangani tahun 2023 adalah sebesar 91,94% dari yang ditargetkan 95% yaitu sebesar 96,77%. Semakin tinggi persentase PMKS yang Tertangani artinya semakin banyak jumlah PMKS di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.



Penanganan PMKS yang dimaksud berupa semua bentuk pelayanan yang diberikan kepada PMKS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelayanan kepada PMKS tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, kesehatan, pemenuhan alat bantu, pemberian rujukan, rehabilitasi sosial, maupun kebutuhan lain yang dibutuhkan masing masing PMKS. Capaian PMKS yang tertangani sudah hampir sama dengan yang ditargetkan, yaitu tercapai 96,77%.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Daya tanggap yang baik dari Para Pekerja Sosial yang menangani berserta mitra kerja dan beberapa pihak terkait dan mampu mendeteksi secara dini permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial lebih dapat menjangkau ke seluruh penerima manfaat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur secara lebih efektif dan efisien;
2. Adanya pembaharuan Data DTKS sehingga memudahkan dalam penanganan PMKS yang tepat sasaran.

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Setiap PMKS memiliki karakteristik permasalahan tersendiri, sedangkan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana serta SDM sangat terbatas;
2. Terdapat PMKS yang sudah terdata untuk difasilitasi, akan tetapi PMKS tersebut tidak melapor sehingga tidak terlaksana.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)/ pekerja sosial agar pelayanan dapat terlaksana lebih maksimal;
2. Melakukan konfirmasi terhadap PMKS yang akan difasilitasi, agar dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan agar proses penanganan lebih mudah dan cepat.

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

Realisasi capaian persentase yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2023 adalah sebesar 80,40% dari yang ditargetkan 84% yaitu sebesar 95,71%. Pemberian bantuan sosial kepada PMKS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, kelompok dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterkantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjaidnya bencana sehingga penanganan PMKS seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Capaian realisasi persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial melebihi dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 95,71%. Bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PMKS yaitu Bantuan



Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Alat Bantu (kursi roda), Bantuan Permakanan, Bantuan Sandang, dll.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan aplikasi SIKS-NG;
2. Koordinasi yang baik antar intern Dinas Sosial maupun mitra kerja dan pihak terkait lainnya (Desa/Kelurahan/Kecamatan).

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terdapat beberapa PMKS yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Dilakukan pembaharuan data DTKS sehingga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pelayanan yang dibutuhkan masing-masing Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama dalam sasaran penerima bantuan sosial yang tepat sasaran;

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA”

Realisasi capaian persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA tahun 2023 adalah sebesar 95% dari yang ditargetkan 98% yaitu sebesar 96,94%. Semakin tingginya partisipasi Tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama terkait penanganan bencana bidang perlindungan



sosial, maka semakin tanggap dan cepat juga penanganan yang dilakukan. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Koordinasi yang baik dengan beberapa pihak terkait seperti Desa/Kelurahan, BPBD dan dinas terkait;
2. Melakukan pelayanan darurat yang cepat dan tanggap terhadap korban bencana serta membantu melakukan tindakan (pendirian shelter, tim logistik dan dapur umum).

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Belum adanya penambahan Tenaga Terampil TAGANA dikarenakan anggaran yang terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Optimalisasi peran Tenaga Terampil TAGANA yang tersedia dalam mitigasi dan penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur dan melakukan pengembangan SDM dengan pelatihan-pelatihan tentang penanganan bencana.
2. Ikut mengerahkan potensi dan SDM/ relawan/ masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.



Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Taman Makam Pahlawan Yang terpelihara”

Realisasi capaian persentase taman makam pahlawan yang terpelihara tahun 2023 adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan 99% yaitu sebesar 101,01%. Terdapat 2 Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga capaian menunjukkan nilai 100% dimana melebihi target yang ditetapkan yaitu 99%.

Taman Makam Pahlawan merupakan sarana pelatarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial sehingga dalam rangka mewujudkan pelestarian dan penadyagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya peningkatan pemeliharaan komponen fisik, kebersihan dan keindahan serta terjaga dan terawatnya Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terpelihara dan terkelolanya komponen fisik Taman Makam Pahlawan yang ada di bawah Dinas Sosial sesuai standar;
2. Terjaga, tertanam dan terlestarikannya nilai-nilai kesetiakawanan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran:

1. Memberikan penanaman nilai kesetiakawanan sosial pada generasi muda terutama anak-anak sekolah melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
2. Melakukan bakti sosial untuk menjaga kebersihan di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur.



✚ Indikator Kinerja Sasaran “Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan”

Realisasi capaian persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan tahun 2023 adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan 100% yaitu sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang membutuhkan keselarasan dalam pemenuhan pelayanan dan penekanan pada skala pembangunan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada rencana pembangunan yang berkesinambungan serta evaluasi pada rencana pembangunan sebelumnya, sehingga pencapaian tujuan pelayanan akan terpenuhi sesuai standard pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pegawai

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran:

1. Meningkatkan kembali pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pegawai dengan mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis.
2. Penyusunan rencana kegiatan pada tahun berjalan secara terstruktur dan efisien.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	101.33	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang diberdayakan	101.33	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	98.29	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	88.24	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	100	
	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	98.89	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	98.89	Menunjang
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	89	



				Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	89	
		Presentase PMKS yang tertangani	96.77	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani	96.77	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	97.97	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan alat dengar, kursi roda dan kruk	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti yang didata dan dibina	100	
							Menunjang



				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang keluarganya diberikan bimbingan sosial	100	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	81.82	
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	100	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	85	
				Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia yang dibantu kebutuhan logistik permakanan	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang dipulangkan dipertemukan dengan keluarganya	106.67	



				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan biaya pengobatan untuk layanan rujukan	40	
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	95.71	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	95.71	Menunjang
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	5.00	
				Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	5.00	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	78.16	
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang dihimpun	5.88	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	94.50	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKH yang diberdayakan	81.25	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK yang dibantu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	73.66	
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	96.94	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	96.94	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	100	



				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana alam/sosial yang diberikan bantuan	100	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	95	
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	95	
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	101.01	PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	101.01	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100	
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	100	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	100	



				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100	
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya penyediaan jumlah Pakaian Olahraga, Atribut Pakaian Dinas dan Baju Daerah disediakan/ dibeli	100	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli tiap tahun	100	



				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli tiap Tahun	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Logistik lainnya yang disediakan dalam 1 Tahun	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Tamu per tahun	100	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor yang di beli	100	
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeller yang di beli	100	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab	100	



				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung yang disediakan	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	100	
				Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar kantor per tahun	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan tertib bayar pajak	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dan dipenuhi BBM nya	100	
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	100	



Berdasarkan Penyajian data pada Tabel 3.6, maka dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung tercapainya **Sasaran 1 “Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial”** yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program yang mendukung tercapainya **Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah”** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	TOTAL REALISASI	
				KEUANGAN	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6,612,931,100	6,909,138,647	5,903,818,520	85.45
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137,115,400	146,515,400	143,166,255	97.71
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	104,620,000	114,020,000	111,181,255	97.51



Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	32,495,400	32,495,400	31,985,000	98.43
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,834,647,382	4,147,089,786	3,290,332,069	79.34
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	3,632,567,382	3,980,429,786	3,135,132,069	78.76
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	202,080,000	166,660,000	155,200,000	93.12
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75,130,000	178,409,700	141,329,803	79.22
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Adanya penyediaan jumlah Pakaian Olahraga, Atribut Pakaian Dinas dan Baju Daerah disediakan/dibeli	30,100,000	50,379,700	48,229,700	95.73
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45,030,000	128,030,000	93,100,103	72.72
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		494,663,550	521,718,950	490,679,508	94.05
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli tiap tahun	10,000,000	12,004,000	9,800,000	81.64
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	164,410,000	177,661,400	156,016,600	87.82
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli tiap Tahun	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Logistik lainnya yang disediakan dalam 1 Tahun	41,255,550	41,255,550	41,164,900	99.78
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21,000,000	21,000,000	20,455,500	97.41
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7,488,000	7,488,000	7,200,000	96.15
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Tamu per tahun	40,000,000	69,610,000	67,970,000	97.64



Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	195,510,000	177,700,000	173,072,508	97.4
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,207,550,000	1,079,380,000	1,069,057,237	99.04
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Motor yang di beli	60,000,000	60,000,000	55,096,000	91.83
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeller yang di beli	116,000,000	105,130,000	103,050,000	98.02
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab	900,000,000	847,000,000	844,681,237	99.73
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung yang disediakan	131,550,000	67,250,000	66,230,000	98.48
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		522,307,168	502,144,911	460,941,558	91.79
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	6,000,000	3,000,000	3,000,000	100
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar kantor per tahun	79,740,000	76,986,860	45,442,098	59.03
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	436,567,168	422,158,051	412,499,460	97.71
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		341,517,600	333,879,900	308,312,092	92.34
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan tertib bayar pajak	228,410,000	177,860,000	172,394,397	96.93
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dan dipenuhi BBM nya	30,007,600	46,394,900	46,214,495	99.61
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	13,040,000	18,640,000	18,640,000	100
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	70,060,000	90,985,000	71,063,200	78.1



PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		392,900,000	260,870,000	259,429,800	99.45
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		25,000,000	-		-
Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah daerah tertinggal yang akan di berdayakan	25,000,000	-	-	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		367,900,000	260,870,000	259,429,800	99.45
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	117,900,000	120,870,000	120,618,500	99.79
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	250,000,000	140,000,000	138,811,300	99.15
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		62,520,000	62,500,000	52,825,000.00	84.52
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		62,520,000	62,500,000	52,825,000	84.52
Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pekerja migran yang dipulangkan dalam 1 tahun	62,520,000	62,500,000	52,825,000	84.52
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		487,230,000	455,522,744	315,171,250.00	69.19
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		251,400,000	236,160,000	169,799,500	71.9
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50,100,000	44,938,000	89.7



Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan alat dengar, kursi roda dan kruk	54,000,000	70,000,000	51,418,000	73.45
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti yang didata dan dibina	72,700,000	24,400,000	12,590,000	51.6
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang keluarganya diberikan bimbingan sosial	40,200,000	23,470,000	13,072,500	55.7
Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	15,750,000	2,800,000	1,540,000	55
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	27,450,000	13,740,000	4,250,000	30.93
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	41,300,000	51,650,000	41,991,000	81.3
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		235,830,000	219,362,744	145,371,750	66.27
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia yang dibantu kebutuhan logistik permakanan	69,850,000	69,850,000	66,165,250	94.72
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang dipulangkan dipertemukan dengan keluarganya	58,300,000	49,040,000	29,506,500	60.17
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan biaya pengobatan untuk layanan rujukan	107,680,000	100,472,744	49,700,000	49.47
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		663,564,600	2,409,180,800	1,125,105,995.00	46.7
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		36,000,000	10,940,000	1,400,000	12.8
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	36,000,000	10,940,000	1,400,000	12.8



Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		627,564,600	2,398,240,800	1,125,105,995	47.21
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang dihimpun	24,970,000	817,810,000	35,561,250	4.35
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	35,529,600	35,529,600	33,979,800	95.64
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKH yang diberdayakan	284,645,000	272,991,200	263,295,100	96.45
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK yang dibantu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	282,420,000	1,256,910,000	792,269,845	63.03
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		332,235,000	368,773,100	338,546,624	91.8
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		192,780,000	199,318,100	174,926,624	87.76
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana alam/sosial yang diberikan bantuan	192,780,000	199,318,100	174,926,624	87.76
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		139,455,000	169,455,000	163,620,000	96.56
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	139,455,000	169,455,000	163,620,000	96.56
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		97,000,000	169,995,850	169,307,480.00	99.6
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		97,000,000	169,995,850	169,307,480	99.6
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	97,000,000	157,995,850	169,307,480	107.16
JUMLAH BELANJA		8,648,380,700	10,635,981,141	8,165,604,671	76.77

Pada Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.635.981.141,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.165.604.671,-. Secara kumulatif capaian kinerja anggaran pada tahun 2023 (76,77%) mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada tahun 2022 (88,03%). Terdapat beberapa



faktor yang menyebabkan adanya penurunan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 yakni sebagai berikut.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi 78,72 % karena adanya beberapa pegawai atau ASN yang mutasi jabatan, meninggal dunia dan manegambil masa persiapan pensiun (MPP) sehingga ada beberapa jabatan yang kosong serta tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum terbayarkan 2 (dua) bulan.
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi 86,78% karena tidak adanya undangan penyelenggaraan bimbingan teknis yang sesuai dengan rencana yang akan diikuti.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi 81.64% karena penambahan dana dilakukan diperubahan sehingga tidak dapat terealisasi sesuai rencana.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi 87,82% karena belum beroperasinya rumah singgah sehingga rencana pemasangan dan pembayaran TV kabel tidak teraksana sesuai yang direncanakan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realiasi 87,26% karena terbatasnya anggaran Kas Daerah sehingga pelaksanaan pembayaran terkendala dana tidak tersedia di Badan Keuangan dan Anggaran Daerah.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisai 59,03% karena rendahnya biaya tagihan listrik pada tahun 2023 sehigga anggaran yang direalisasikan rendah.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, realiasi 84,52% karena sudah terpenuhinya pemulangan warga migran untuk dipulangkan ke daerah asalnya



Program Rehabilitasi Sosial

- Penyediaan Sandang, realisasi 89,70% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota sehingga biaya yang digunakan untuk transportasi tidak besar dan penganggaran yang diajukan diminmalkan sesuai dengan data PPKS yang ditangani.
- Penyediaan Alat Bantu, realisasi 73,45% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota sehingga biaya yang digunakan untuk transportasi tidak besar dan penganggaran yang diajukan diminmalkan sesuai dengan data PPKS yang ditangani.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, realisasi 51,60% karena tekendala sulitnya pengspj-an kegiatan makan minum di lapangan.
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, realisasi 55,70% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota sehingga biaya yang digunakan untuk transportasi tidak besar dan penganggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS yang ditangani.
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, realisasi 55% karena kurangnya pengaduan terkait permohonan fasilitasi pembuatan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, realisasi 30,93% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota sehingga biaya yang digunakan untuk transportasi tidak besar dan penganggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS yang ditangani.
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan, realisasi 81,30% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota sehingga biaya yang digunakan untuk transportasi tidak



besar dan penganggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS yang ditangani.

- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, realisasi 60,17% karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani untuk dipulangkan ke keluarganya atau yang diberikan pelayanan sebagian besar didalam kota
- Pemberian Pelayanan Rujukan, realisasi 49,47% karena kurangnya pengaduan dan permohonan layanan rujukan berobat dari masyarakat.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar, realisasi 12,80% karena berkurangnya kasus anak – anak terlantar.
- Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi 4,27% karena untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan ektrsem tidak bisa dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri keuangan RI No. 97 Tahun 2023.
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, realisasi 63,03% karena kendala waktu yang diberikan tidak mendukung berdsarkan anggaran yang tersedia terdapat pada DPA perubahan.

Program Penanganan Bencana

- Penyediaan Makanan, realisasi 87.76% karena biaya sewa angkutan barang dan transportasi tidak dapat direalisasikan karena sudah tertangani berkurangnya bencana.



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	97	98.29	101.33	260,870,000	259,429,800	99.45	1.02
		90	89	98.89	62,500,000	52,825,000	84.52	1.17
		95	91.94	96.77	654,840,844	490,097,874	74.84	1.29
		84	80.40	95.71	1,646,178,100	1,129,717,719	68.63	1.39
		98	95	96.94	169,455,000	163,620,000	96.56	1.00
		99	100	101.01	169,995,850	169,307,480	99.60	1.01
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	6,909,138,647	5,903,818,522	85.45	1.17



Tingkat Efisiensi dihitung melalui rumus : **Efisien = Output/Input**

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika Output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah persentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan Penyajian data pada Tabel 3.9 diatas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut.

- a. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang diberdayakan realisasi kinerjanya adalah 98.29% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 101.33% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 99.45% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.02.
- b. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase warga negara migran yang dipulangkan realisasi kinerjanya adalah 89% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 98.89% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 84.52% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.17.
- c. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang tertangani realisasi kinerjanya adalah 91.94% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 96.77% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 74.84% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.29.
- d. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial realisasi kinerjanya adalah 80.40% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 95.71%



- dan tingkat realisasi anggaran sebesar 68.63% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.39.
- e. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase ketersediaan tenaga terampil TAGANA realisasi kinerjanya adalah 95% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 96.94% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 96.56% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.00.
 - f. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase taman makam pahlawan yang terpelihara realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 101.01% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 99.60% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.01.
 - g. Sasaran meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah dalam indikator persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 85.45% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.17.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah **EFISIEN** (Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	97	98.29	101.33	260,870,000	259,429,800	99%	101.89
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	117	115	98.29	260,870,000	259,429,800	99%	98.84
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	17	15	88.24	120,870,000	120,618,500	100%	88.42
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	100	100	140,000,000	138,811,300	99%	100.86
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	90	89.00	98.89	62,500,000	52,825,000	85%	117.00
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	100	89	89.00	62,500,000	52,825,000	85%	105.30
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	100	89	89.00	62,500,000	52,825,000	85%	105.30



3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	95	91.94	96.77	455,522,744	315,171,250	69%	139.87
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	197	193	97.97	236,160,000	169,799,500	72%	136.26
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	40	40	100.00	50,100,000	44,938,000	90%	111.49
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	22	22	100.00	70,000,000	51,418,000	73%	136.14
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	40	40	100.00	24,400,000	12,590,000	52%	193.80
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20	20	100.00	23,470,000	13,072,500	56%	179.54
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	22	18	81.82	2,800,000	1,540,000	55%	148.76
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15	15	100.00	13,740,000	4,250,000	31%	323.29
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	38	38	100.00	51,650,000	41,991,000	81%	123.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	75	60	80.00	219,362,744	145,371,750	66%	120.72
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	40	40	100.00	69,850,000	66,165,250	95%	105.57
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	15	16	106.67	49,040,000	29,506,500	60%	177.28
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	20	4	20.00	100,472,744	49,700,000	49%	40.43



4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	84	80.40	95.71	2,163,180,800	886,005,995	41%	233.68
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	20	1	5.00	10,940,000	1,400,000	13%	39.07
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20	1	5.00	10,940,000	1,400,000	13%	39.07
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	751	587	78.16	2,152,240,800	884,605,995	41%	190.17
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17	1	5.88	832,810,000	35,561,250	4%	137.76
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200	189	94.50	35,529,600	33,979,800	96%	98.81
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	48	39	81.25	26,991,200	22,795,100	84%	96.21
	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	486	358	73.66	1,256,910,000	792,269,845	63%	116.86
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	98	95.00	96.94	368,773,100	338,546,624	92%	105.59
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	65	65	100	199,318,100	174,926,624	88%	113.94
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	65	65	100	199,318,100	174,926,624	88%	113.94
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40	38	95.00	169,455,000	163,620,000	97%	98.39
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40	38	95.00	169,455,000	163,620,000	97%	98.39
6	PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99	100.00	101.01	169,995,850	169,307,480	100%	101.42
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	100	169,995,850	169,307,480	100%	100.41
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	100	169,995,850	169,307,480	100%	100.41



7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100.00	100	6,909,138,647	5,900,401,408	85%	117.10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	100	146,515,400	143,166,255	98%	102.34
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7	7	100	114,020,000	111,181,255	98%	102.55
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	100	32,495,400	31,985,000	98%	101.60
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	4,147,089,786	3,290,332,069	79%	126.04
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	3,980,429,786	3,135,132,069	79%	126.96
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tgs ASN	13	13	100	166,660,000	155,200,000	93%	107.38
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	178,409,700	159,332,758	89%	111.97
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43	43	100	50,379,700	48,229,700	96%	104.46
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	6	75	128,030,000	111,103,058	87%	86.43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	521,718,950	472,646,553	91%	110.38
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	12	10	83	12,004,000	9,800,000	82%	102.07
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	7	70	177,661,400	156,016,600	88%	79.71
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100	15,000,000	15,000,000	100%	100.00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	41,255,550	41,164,900	100%	100.22
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50000	48852	98	21,000,000	20,455,500	97%	100.30
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36	36	100	7,488,000	7,200,000	96%	104.00



Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	3	3	100	69,610,000	67,970,000	98%	102.41
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	100	177,700,000	155,039,553	87%	114.62
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Drh			100	1,079,380,000	1,065,670,123	99%	101.29
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	2	100	60,000,000	55,096,000	92%	108.90
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	16	16	100	105,130,000	103,050,000	98%	102.02
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	100	847,000,000	841,294,123	99%	100.68
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	5	100	67,250,000	66,230,000	98%	101.54
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	502,144,911	460,941,558	92%	108.94
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	3,000,000	3,000,000	100%	100.00
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	8	67	76,986,860	45,442,098	59%	112.94
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15	15	100	422,158,051	412,499,460	98%	102.34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	333,879,900	308,312,092	92%	108.29
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	7	100	177,860,000	172,394,397	97%	103.17
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100	46,394,900	46,214,495	100%	100.39
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100	18,640,000	18,640,000	100%	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	292	161	55	90,985,000	71,063,200	78%	70.59



D. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil yang telah dicapai secara keseluruhan, target sasaran dapat mencapai bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditentukan. Hampir di setiap kegiatan, pencapaian target sasaran rata-rata 80 sampai dengan 100 keatas sebagaimana yang telah tertuang didalam pengukuran kinerja. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target tapi sudah tertangani.

E. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 berjumlah ***Rp.10.635.981.141,-*** yang terdiri dari Belanja Operasi ***Rp.9.405.538.641,-*** dan Belanja Modal ***Rp.1.230.442.500,-***.

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Operasi	<i>9.405.538.641,-</i>	<i>6.966.139.584</i>
2	Belanja Modal	<i>1.230.442.500</i>	<i>1.190.057.237</i>



BAB IV PENUTUP

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur 2 (dua) sasaran dengan 7 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang diberdayakan realisasi kinerjanya adalah **98.29%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **101.33%** (**Kategori Sangat Tinggi**).
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase warga negara migran yang dipulangkan realisasi kinerjanya adalah **89%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **98.89%** (**Kategori Sangat Tinggi**)



- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang tertangani realisasi kinerjanya adalah **91.94%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **96.77%** (**Kategori Sangat Tinggi**)
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial realisasi kinerjanya adalah **80.40%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **95.71%** (**Kategori Sangat Tinggi**)
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase ketersediaan tenaga terampil TAGANA realisasi kinerjanya adalah **95%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **96.94%** (**Kategori Sangat Tinggi**)
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase taman makam pahlawan yang terpelihara realisasi kinerjanya adalah **100%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **101.01%** (**Kategori Sangat Tinggi**)
- Sasaran meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah dalam indikator persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan realisasi kinerjanya adalah **100%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100%** (**Kategori Sangat Tinggi**)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.635.981.141 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.165.604.671 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 76.77% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 23,23%.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HAWANAN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198911 1 001



LAMPIRAN

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. WIYONO, SE**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Pihak Pertama,

H. WIYONO, SE
NIP.19671010 1994031 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nama : **H. WIYONO, SE**
NIP : 19671010 1994031 013
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90%
		Presentase PMKS yang tertangani	95%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

No.	Program	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.909.138.647,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 260.870.000,-	APBD
4	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 62.500.000,-	APBD

5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 455.522.744,-	APBD
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.409.180.800,-	APBD
7	Program Penanganan Bencana	Rp. 368.773.100,-	APBD
8	Program Pengelola Taman Makam Pahlawan	Rp. 169.995.850,-	APBD

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Pihak Pertama,

H. WIYONO, SE
NIP.19671010 1994031 013



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WIDYA YULIANTI, S.H., M.M**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. WIYONO, SE**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. WIYONO, SE

NIP.19671010 199403 1 013

Sampit, Oktober 2023

Pihak Pertama,

WIDYA YULIANTI, S.H., M.M

NIP. 19810720 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **WIDYA YULIANTI, S.H., M.M**
NIP : 19810720 200003 2 001
Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan kompenen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pemenuhan kewajiban Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Kewajiban Administrasi Keuangan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Pengelola Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
3	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 6.909.138.647,-	APBD

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


H. WIYONO, SE
NIP. 19671010 199403 1 013

Sampit, Oktober 2023

Sekretaris Dinas,


WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **WIDYA YULIANTI, S.H., M.M**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001

Pihak Pertama,

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730507 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pemenuhan kewajiban Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp.	2.648.028.861,-	APBD

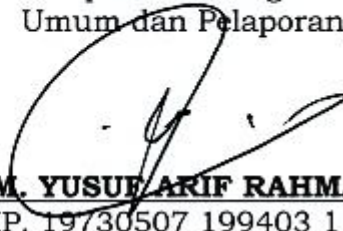
Sampit, Oktober 2023

Sekretaris Dinas,



WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001

Kepala Sub Bagian
Umum dan Pelaporan,



M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730507 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**
NIP : 19730507 199403 1 010
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I(III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pelayanan Adminsitasi Kepegawaian	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Adminsitasi Kepegawaian	90-100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Kuantitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
3	Terlaksananya Nilai Akuntabilitas	Kuantitas	Persentase Laporan akuntabilitas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Laporan Akuntabilitas	90-100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 32.495.400,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 32.495.400,-	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 178.409.700,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 50.379.700,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 128.030.000,-	APBD

4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 521.718.950,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Rp. 12.004.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 177.661.400,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 15.000.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	Rp. 41.255.550,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Bahan Cetak dan Penggandaan	Rp. 21.000.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.488.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 69.610.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 177.700.000,-	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.079.380.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 60.000.000,-	APBD APBD
	▪ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 105.130.000,-	
	▪ Sub Kegiatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 847.000.000,-	
	▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 67.250.000,-	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 502.144.911	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rp. 76.986.860,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 422.158.051,-	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 333.879.900,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 177.860.000,-	APBD

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Rp. 46.394.900,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 18.640.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Rp. 90.985.000,-	APBD

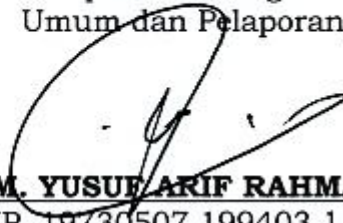
Sampit, Oktober 2023

Sekretaris Dinas,



WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
 NIP. 19810720 200003 2 001

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Pelaporan,



M. YUSUE ARIF RAHMAN
 NIP. 19730507 199403 1 010



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIANA, S.Pi, M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **WIDYA YULIANTI, S.H., M.M**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi, M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Kewajiban Administrasi Keuangan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Pengelola Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.	4.261.109.786,-	APBD

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,



WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001

Pihak Pertama,



APRIANA, S.Pi, M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **APRIANA, S.Pi, M.Pi**
NIP : 19770416 201101 2 008
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	Kuantitas	Persentasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	95%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	95%
2	Terlaksananya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kuantitas	Presentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	95%
		Kualitas	Tingkat Peresentase kesesuaian antara Dokumen Laporan pertanggungjawaban Keuangan dengan data dukung serta juknis penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan	95%
3	Terlaksananya Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	4 Dokumen
		Kualitas	Tingkat Presentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90%
4	Terlaksananya Laporan Rencana Kerja Awal (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	2 Dokumen
		Kualitas	Tingkat Presentase Laporan (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 114.020.000,- Rp. 114.020.000,-	APBD APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 4.147.089.786,- Rp. 3.980.429.786,- Rp. 166.660.000,-	APBD APBD APBD

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,



WIDYA YULIANTI, S.H., M.M
NIP. 19810720 200003 2 001

Pihak Pertama,



APRIANA, S.Pi, M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUSTIAWANY, S.Pd., M.Hum**

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. WIYONO, SE**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. WIYONO, SE
NIP. 19671010 199403 1 013

Sampit, Oktober 2023

Pihak Pertama,

AGUSTIAWANY, S.Pd., M.Hum
NIP. 19700802 199512 2 004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98%

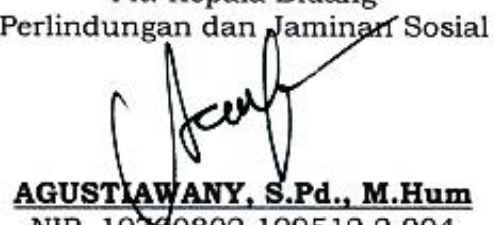
No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 62.500.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.141.330.800,-	APBD
3.	Program Penanganan Bencana	Rp. 368.773.100,-	APBD

Sampit, Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


H. WIYONO, SE
NIP. 19671010 199403 1 013

Plt. Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial


AGUSTIAWANY, S.Pd., M.Hum
NIP. 19760802 199512 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **AGUSTIAWANY, S.Pd., M.Hum**
NIP : 19700802 1995122004
Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam/Sosial	Kuantitas	Pemberian Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Soisal	10
2	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya Data PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	5
3	Terlaksananya Peran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan TAGANA dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	SDM PKH dan TAGANA Menerima Konsultasi dan Pembinaan	15
4	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada PPKS	Kuantitas	Pemberian Layanan Langsung Kepada PPKS	10

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 62.500.000,-	APBD
	Pemulangan Warga Negara Migrain Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Rp. 62.500.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migrain Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Rp. 62.500.000,-	APBD

	Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal		
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ▪ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.141.330.800,- Rp. 832.810.000,- Rp. 35.529.600,- Rp. 272.991.200,-	APBD APBD APBD APBD
3.	Program Penanganan Bencana	Rp. 368.773.100,-	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota ▪ Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 199.318.100,- Rp. 199.318.100,- Rp. 169.455.000,- Rp. 169.455.000,-	APBD APBD APBD APBD

Sampit, Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


H. WIYONO, SE
NIP. 19671010 199403 1 013

Plt. Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial


AGUSTIAWANY, S.Pd., M.Hum
NIP. 19760802 199512 2 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAHMUDI, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. WIYONO, SE**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,


H. WIYONO, SE
NIP.19671010 199403 1 013

Pihak Pertama,


MAHMUDI, SP
NIP. 19750727 200604 1 011

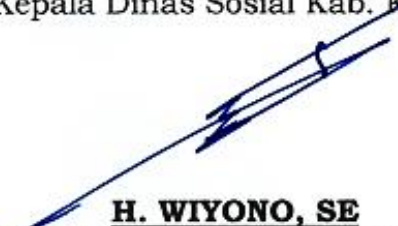
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
 Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

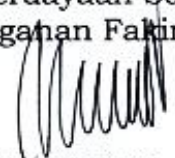
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99%

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 260.870.000,-	APBD
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial : Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.256.910.000,-	APBD
3.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 169.995.850,-	APBD

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


H. WIYONO, SE
 NIP.19671010 199403 1 013

Sampit, Oktober 2023

Kepala Bidang
 Pemberdayaan Sosial dan
 Penanganan Fakir Miskin,

MAHMUDI, SP
 NIP. 19750727 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **MAHMUDI, SP**
NIP : 19750727 200604 1 011
Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)
1	Terlaksananya Kualitas Fisik bangunan Taman Makam Pahlawan dan rasa Hormat terhadap para pejuang perintis kemerdekaan /veteran	Kuantitas	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan direhab bangunan fisiknya	2 TMP
2	Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada para pejuang/ Veteran	Kuantitas	Jumlah Para Pejuang Perintis Kemerdekaan /Veteran yang diberikan bantuan	20 Orang Veteran
3	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS Organisasi	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	80-95%
4	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK dan Karang Teruna

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 260.870.000,-	APBD
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Rp. 0,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Rp. 0,-	APBD
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 260.870.000,-	APBD

	▪ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota ▪ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 120.870.000,- Rp. 140.000.000,-	APBD APBD
2.	Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota ▪ Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 1.256.910.000,- Rp. 1.256.910.000,-	APBD APBD
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 169.995.850,-	APBD
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 169.995.850,-	APBD

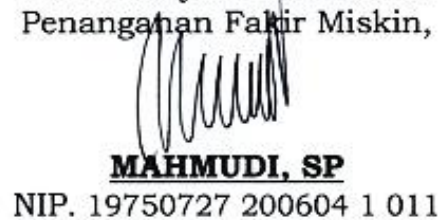
Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,



H. WIYONO, SE
NIP.19671010 199403 1 013

Sampit, Oktober 2023

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin,



MAHMUDI, SP
NIP. 19750727 200604 1 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. WIYONO, SE**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. WIYONO, SE
NIP.19671010 199403 1 013


Drs. YUNUS
NIP. 19670620 199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PMKS yang tertangani	95%

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 455.522.744,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 10.940.000,-	APBD

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,


H. WIYONO, SE
NIP.19671010 199403 1 013

Pihak Pertama,


Drs. YUNUS
NIP. 19670620199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (ANGGARAN PERUBAHAN)
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **Drs. YUNUS**
NIP : 19670620 199403 1 012
Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023 (Anggaran Perubahan)

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang memperoleh bantuan	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan kreteria dari Kemensos tentang penerima bantuan	80-95%
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial dan tuna sosial	Kuantitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial	80-97%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	80-95%
3	Terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan Kreteria dari Kementerian Sosial tentang Penerima Bantuan	80-95%
4	Terlaksananya Peran Pekerja Sosial dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Jumlah penyelesaian masalah/perkara yang ditangani Pekerja sosial/potensi sumber Kesejahteraan sosial	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	80-95%
5	Terlaksananya laporan rencana aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Jumlah dokumen pelaporan	80-95%
		Kualitas	kesesuaian laporan berdasar klien yang ditangani	80-95%
		Waktu	Tingkat ketepatan waktupengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 455.522.744,-	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 236.160.000,-	APBD
	▪ Penyediaan Sandang ▪ Sub kegiatan penyediaan alat bantu	Rp. 50.100.000,- Rp. 70.000.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial ▪ Sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat ▪ Sub kegiatan Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak ▪ Sub kegiatan Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar ▪ Sub kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan	Rp. 24.400.000,- Rp. 23.470.000,- Rp. 2.800.000,- Rp. 13.740.000,- Rp. 51.650.000,-	APBD APBD APBD APBD
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Rp. 219.362.744,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Permakanan ▪ Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga ▪ Sub kegiatan pemberian layanan rujukan	Rp. 69.850.000,- Rp. 49.040.000,- Rp. 100.472.744,-	APBD APBD APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 10.940.000,-	APBD

	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Rp. 10.940.000,-	APBD
	▪ Sub kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar	Rp. 10.940.000,-	APBD

Sampit, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. WIYONO, SE
NIP.19671010 199403 1 013


Drs. YUNUS
NIP. 19670620 199403 1 012



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRILIANA MEISYADINI, S.E**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

Pihak Pertama,

TRILIANA MEISYADINI, S.E

NIP. 19900518 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **TRILIANA MEISYADINI, S.E**
NIP : 19900518 202012 2 008
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	Kuantitas	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya proses pengelolaan SPP-SPM	Kuantitas	Persentase proses pengelolaan SPP-SPM	90-100%
		Kualitas	Persentase kesesuaian juknis/aturan yang berlaku	90-100%
2	Terpenuhinya proses pembayaran terhadap bukti tagihan belanja melalui mekanisme UP/GU/LS	Kuantitas	Persentase proses pembayaran atas tagihan belanja	90-100%
		Kualitas	Persentase sesuai juknis/aturan yang berlaku	90-100%

Sampit, Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan

APRIANA, S.Pi., M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008

Bendahara,

TRILIANA MEISYADINI, S.E
NIP. 19900518 202012 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINDA LESTIANA, S.Sos**

Jabatan : Penata Laporan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008


WINDA LESTIANA, S.Sos

NIP. 19920914 202012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **WINDA LESTIANA, S.Sos**
 NIP : 19920914 202012 2 009
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Penata Laporan Keuangan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kuantitas	Presentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	90-100%
		Kualitas	Tingkat Peresentase kesesuaian antara Dokumen Laporan pertanggungjawaban Keuangan dengan data dukung serta juknis penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan	90-100%
2	Terlaksananya Laporan Rencana Kerja Awal (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%
		Kualitas	Tingkat presentase Laporan (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kuantitas	Persentase Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran	90%

2	Tersediannya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Awal dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	Kuantitas	Jumlah Laporan Rencana Kerja (Renja) Awal dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase Laporan Rencana Kerja (Renja) Awal dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%

Sampit, Januari 2023

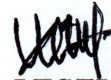
Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan



APRIANA, S.Pi., M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

Penata Laporan Keuangan,



WINDA LESTIANA, S.Sos

NIP. 19920914 202012 2 009



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPRIADY, S.A.P**

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730305 199403 1 010

Pihak Pertama,

SUPRIADY, S.A.P
NIP. 19730604 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUPRIADY, S.A.P**
NIP : 19730604 200701 1 019
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Kuantitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Administrasi Barang dan Aset yang terinventarisasi dengan baik	Kuantitas	Persentasi barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Sistem Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Buku Inventaris (BI)	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Buku Inventaris (BI)	90-100%
2	Tersedianya Rekon aset Melalui barang pakai habis dan Pengadaan barang milik daerah	Kuantitas	Persentase Laporan Rekon Barang Pakai Habis dan peralatan kantor yang diadakan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Kondisi fisik perabot kantor yang diadakan	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum
Dan Pelaporan

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730305 199403 1 010

Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah,

SUPRIADY, S.A.P
NIP. 19730604 200701 1 019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRANI, S.Pd**

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

Pihak Pertama,

KHAIRANI, S.Pd

NIP. 19800324 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **KHAIRANI, S.Pd**
 NIP : 19800324 200904 1 002
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
2	Terlaksananya Laporan Rencana Kerja Awal (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%
		Kualitas	Tingkat presentase Laporan (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
		Kualitas	Tingkat persentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
2	Terpenuhinya laporan evaluasi renja	Kuantitas	Tersedianya laporan evaluasi renja	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase laporan evaluasi renja	90-100%

Sampit, Januari 2023

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan

APRIANA, S.Pi., M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008

Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran,

KHAIRANI, S.Pd
NIP. 19800324 200904 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NYAING, A.Md**
Jabatan : Analis Jaminan Sosial
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **WATMIN, S.ST**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

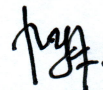
Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua, .


WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,



NYAING, A.Md

NIP.19791116 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **NYAING, A.Md**
NIP : 19791116 201001 2 005
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Analis Jaminan Sosial
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

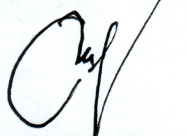
NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam/Sosial	Kuantitas	Pemberian Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Soisal	10
			Tersedianya Laporan Logistik	5
3	Terlaksananya Peran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan TAGANA dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	SDM PKH dan TAGANA Menerima Konsultasi dan Pembinaan	15

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Bantuan Korban Bencana Alam/Sosial	Kuantitas	Terpenuhinya Bantuan Bagi Korban Bencana Alam/Sosial	10
2	Tersedianya Laporan Mutasi Barang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA)	Kuantitas	Tersusunnya Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran	5
3	Terlaksananya Asesmen Orang Terlantar	Kuantitas	Terpenuhinya Asesmen Orang Terlantar	10
3	Tersedianya Pelayanan Bagi SDM PKH dan KPM PKH	Kuantitas	Terpenuhinya Pelayanan kepada SDM PKH dan KPM PKH	10

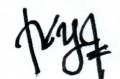
Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, .

Analis Jaminan Sosial,


WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002



NYAING, A.Md

NIP.19791116 201001 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **WATMIN, S.ST**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos

NIP.19950625 202203 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

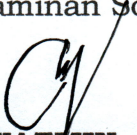
Nama : **DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos**
NIP : 19950625 202203 2 005
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya Data PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	5

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memberikan Layanan Bagi Masyarakat Umum dan Penerima Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maupun Kelompok Sasaran	Kuantitas	Terpenuhinya Pemeriksaan Data Bantuan Sosial bagi Masyarakat Umum dan Penerima Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maupun Kelompok Sasaran yang Hadir ke Dinas Sosial	15
2	Mengelola Data Bantuan Sosial	Kuantitas	Terpenuhinya Penanganan Permasalahan, Verifikasi Data Bantuan Sosial	10
			Terpenuhinya Finalisasi dan Pengesahan Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial	13
3	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Individu, Kelompok Sasaran, Masyarakat Luas, dan Pihak Berpengaruh	Kuantitas	Terpenuhinya Surat/Dokumen/Laporan Sebagai Bahan Koordinasi Data Bantuan Sosial	10

Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,


WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002

Pekerja Sosial Ahli Pertama,


DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos

NIP.19950625 202203 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **WATMIN, S.ST**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002

Pihak Pertama,

SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos

NIP.19940106 202203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos**
 NIP : 19940106 202203 2 008
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

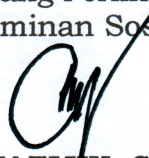
NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada PPKS	Kuantitas	Pemberian Layanan Langsung Kepada PPKS	10

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan informasi bagi individu, keluarga, masyarakat dan pihak berpengaruh tentang program penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5
2	Melaksanakan dan menyusun rancangan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber	Kuantitas	Terpenuhinya dokumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber	5
3	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan sosial	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan sosial	5

4	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan sosial	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan sosial	5
---	---	-----------	--	---

Sampit, Januari 2023

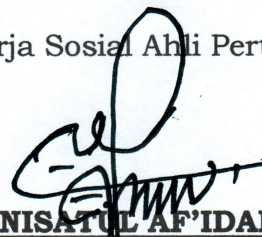
Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,



WATMIN, S.ST

NIP.19680503 199401 1 002

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos

NIP.19940106 202203 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP**

Jabatan : Analis Pelayanan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP

NIP. 19820523 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP**
 NIP : 19820523 200604 2 018
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
 Jabatan : Analis Pelayanan Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

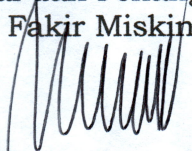
NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS Organisasi	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	80-95%
2	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK dan Karang Taruna

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peran PSKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya data/Laporan Peran PSKS (Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial/TKSK dan Karang Taruna dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	2 Lembaga Kesejahteraan Sosial
2	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi/Ijin Pengumpulan Uang-Barang kepada PPKS	15 Orang PPKS
			Terlaksananya Kegiatan Penarikan Undian Kepada PPKS	4 Kegiatan

			Tersedianya Data Penerima Bantuan Non Tunai Sumber Dana APBN/APBD	80 Orang PPKS
--	--	--	--	------------------

Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin,



MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Analisis Pelayanan Sosial,



BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP

NIP. 19820523 200604 2 018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENEDIKTA WINA MAHARANI, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

BENEDIKTA WINA M., S.Tr.Sos

NIP.19980616 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

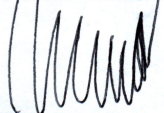
Nama : **BENEDIKTA WINA MAHARANI, S.Tr.Sos**
NIP : 19980616 202203 2 006
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	80-95%

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pendataan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Dokumen/laporan pendataan pelayanan kesejahteraan sosial pada PPKS	5 Laporan
2	Terlaksananya pengumpulan dan klasifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan ketentuan	Kuantitas	Dokumen/data pengklasifikasian data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	5 Dokumen
3	Terlaksananya pengarsipan data dan bahan informasi bagi PPKS sesuai dengan prosedur yang berlaku	Kuantitas	Terpenuhinya jumlah data dan bahan informasi yang diarsipkan	5 Dokumen

Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin,



MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



BENEDIKTA WINA M., S.Tr.Sos

NIP.19980616 202203 2 006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DASEP HIDAYAT**

Jabatan : Pranata Taman Makam Pahlawan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

DASEP HIDAYAT

NIP.19681217 200701 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **DASEP HIDAYAT**
NIP : 19681217 200701 1 014
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Taman Makam Pahlawan
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	80-95%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Ziarah Nasional dan Ziarah Rombongan	Kuantitas	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Ziarah Rombongan dan Ziarah Nasional	10
		Kualitas	Kesesuaian sarana dan prasarana bagi Ziarah Nasional dan Rombongan	90-100%
2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	Kuantitas	Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	90-100%
		Kualitas	Menjaga Kebersihan dan Keindahan Taman Makam Pahlawan	90-100%

Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin,



MAHMUDI, SP
NIP. 19750727 200604 1 011

Pranata Taman
Makam Pahlawan,



DASEP HIDAYAT
NIP.19681217 200701 1 014



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPARNO**

Jabatan : Pengelola Pembinaan Bantuan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

SUPARNO

NIP.19720403 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUPARNO**
NIP : 19720403 200604 1 013
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Pembinaan Bantuan
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	TKSK dan Karang Taruna

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkelolanya Data Pembinaan Bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kuantitas	Tersedianya Laporan/Data Pembinaan Bantuan	5 Laporan

Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin,



MAHMUDI, SP

NIP. 19750727 200604 1 011

Pengelola Pembinaan Bantuan,

SUPARNO

NIP.19720403 200604 1 013



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUMIDI, S.H**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. YUNUS**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

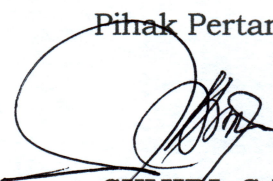
Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

Pihak Pertama,


SUMIDI, S.H

NIP. 19680522 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUMIDI, S.H**
 NIP : 19680522 199003 1 003
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. (III/d)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan Kreteria dari Kementerian Sosial tentang Penerima Bantuan	80-95%
2	Terlaksananya laporan rencana aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Jumlah dokomen pelaporan	80-95%
		Kualitas	kesesuaian laporan berdasar klien yang ditangani	80-95%
		Waktu	Tingkat ketepatan waktupengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penyediaan Alat bantu	Kuantitas	Terpenuhinya pemberian pelayanan kepada PPKS yang diberikan bantuan Kaki palsu baik atas atau bawah lutut	Dokumen
		Kualitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan alat bantu Kaki palsu bawah dan atau atas lutut	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan
2	Terlaksananya fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kuantitas	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Dokumen
		Kualitas	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan
3	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Laporan
		Kualitas	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan untuk biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS serta akses layanan pendidikan	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

4	Terlaksananya Pemberian Layanan Reunifikasi keluarga	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dokumen
		Kualitas	Jumlah PPKS yang dipulangkan dipertemukan dengan keluarganya	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan
5	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Rujukan	Dokumen
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Laporan Bulanan berdasarkan klien yang ditangani jumlah PPKS	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan
6	Terlaksananya Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Tingkat Kesesuaian Laporan Bulanan berdasarkan klien yang ditangani	1 Dokumen
		Kualitas	Terpenuhinya Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

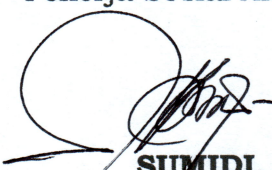
Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,


Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

Pekerja Sosial Ahli Muda,


SUMIDI, S.H

NIP. 19680522 199003 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI HAMISAH, S.E**
Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. YUNUS**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012


SITI HAMISAH, S.E

NIP. 1960215 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SITI HAMISAH, S.E**
NIP : 1960215 200604 2 011
Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang memperoleh bantuan	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan kriteria dari Kemensos tentang penerima bantuan	80-95%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pemberian layanan pendidikan dasar anak terlantar	Kualitas	Jumlah pendidikan pelatihan	4
2	Terlaksananya layanan Reunifikasi anak	Kualitas	Jumlah anak yang di kembalikan kepada keluarga	4
3	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan anak panti	Kualitas	Jumlah anak yang di beri pelayanan anak panti	1

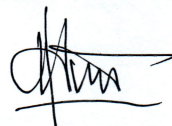
Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,


Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

Analis Rehabilitasi Masalah Sosial,



SITI HAMISAH, S.E

NIP. 1960215 200604 2 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos**

Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos

NIP. 19840419201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos**
 NIP : 19840419201001 2 006
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial dan tuna sosial	Kuantitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial	80-97%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	80-95%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	terlaksananya bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis	Kuantitas	Jumlah bimbingan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis	2 Kegiatan
		Kualitas	terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis	80-85%
2	terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Kuantitas	jumlah bimbingan sosial yang di berikan kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2 Kegiatan
		Kualitas	terpenuhinya bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	80-85%
4	terlaksananya pemberian bantuan sosial pengobatan rujukan	Kuantitas	jumlah penerima bantuan pengobatan	4 Orang

5	terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk reunifikasi keluarga	Kuantitas	jumlah orang yang menerima bantuan sosial reunifikasi keluarga	2 Orang
---	---	-----------	--	---------

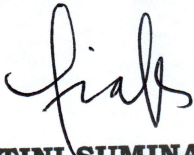
Sampit, Januari 2023

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,

Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial,


Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012


TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos
NIP. 19840419201001 2 006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos

NIP. 19971206 202203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos**
 NIP : 19971206 202203 1 005
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Peran Pekerja Sosial dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Jumlah penyelesaian masalah/perkara yang ditangani Pekerja sosial/potensi sumber Kesejahteraan sosial	80-95%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	80-95%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan penjangkauan PPKS	Kuantitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh	12 Laporan
			Menyusun instrumen identifikasi awal dan seleksi	1 Instrumen
			Terlaksananya penjangkauan calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial	12 Laporan
			Terlaksananya kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program kesejahteraan sosial	12 Dokumen
2	Melaksanakan asesmen PPKS	Kuantitas	Menyusun instrument asesmen masalah, kebutuhan dan system sumber	1 Instrumen

			Melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen, masalah kebutuhan dan system sumber	12 Laporan
			Menyusun rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta melaksanakan penyusunan rencana intervensi penerima program	12 Dokumen Rancangan
3	Melaksanakan intervensi/pemberian layanan kepada PPKS	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial	12 Laporan
4	Melaksanakan evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PPKS	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam seting mikro	12 Laporan
5	Melaksanakan terminasi dan bimbingan lanjut kepada PPKS	Kuantitas	Melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat dan pihak lainnya	12 Laporan
			Menyusun instrument bimbingan dan pembinaan lanjut	1 Instrumen
			Menyusun materi bimbingan dan pembinaan lanjut	1 materi
			Melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan setting mikro	2 Laporan

Sampit, Januari 2023

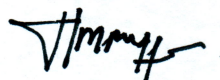
Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012



M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos

NIP. 19971206 202203 1 005

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023 (Perubahan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90%
		Presentase PMKS yang tertangani	95%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	84%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	99%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

H. WIYONO, SE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19671010 199403 1 013

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,99
			Persentase PMKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga terampil tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91

Keterangan

(2) : Diisi dengan tujuan Perangkat Daerah

(3) : Diisi dengan sasaran Perangkat Daerah

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang diberdayakan	55,37	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37	91,37
2	Persentase PMKS yang tertangani	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
3	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	64,93	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,93	94,93
4	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	22,07	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07	94,07
5.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan	68,59	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	98,59	94,93

TABEL 1.1
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD (PERUBAHAN)
DINAS SOSIAL Per 31 Desember 2023

Lampiran 1a

JUMLAH PROGRAM : 7 Program
 JUMLAH KEGIATAN : 17 Kegiatan
 JUMLAH SUB KEGIATAN : 48 Sub Kegiatan

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		SUB RINCIAN OBJEK	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)		
															BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)				
1										2	3	4	5	6	7=6/3*100	8	9	10=9/4*100	11	12=6+9	13=12/5*100	14	15=5-12			
1											UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH															
1	06										9,405,538,641	1,230,442,500	10,635,981,141	-			1,190,057,237			-	-	-				
1	06	01									5,705,696,147	1,230,442,500	6,909,138,647	4,725,461,285	82.82	64,50				5,903,818,522.00	85.45	64,50	1,005,320,125			
1	06	01	2.01								146,515,400	-	146,515,400	143,166,255	97.71	63,60	-	-	-	143,166,255	97.71	63,60	3,349,145			
1	06	01	2.01	04							114,020,000	-	114,020,000	111,181,255	97.51	100,00	-	-	-	111,181,255	97.51	100,00	2,838,745			
					5	1	02				114,020,000	-	114,020,000	111,181,255	97.51	100,00	-	-	-	111,181,255	97.51	100,00	2,838,745			
					5	1	02	04	01	0001	105,060,000	-	105,060,000	104,901,255	99.85	100,00	-	-	-	104,901,255	99.85	100,00	158,745			
					5	1	02	04	01	0003	8,960,000	-	8,960,000	6,280,000	70.09	100,00	-	-	-	6,280,000	70.09	100,00	2,680,000			
1	06	01	2.01	06							32,495,400	-	32,495,400	31,985,000	98.43	100,00	-	-	-	31,985,000	98.43	100,00	510,400			
					5	1	02				32,495,400	-	32,495,400	31,985,000	98.43	100,00	-	-	-	31,985,000	98.43	100,00	510,400			
					5	1	02	01	01	0024	32,495,400	-	32,495,400	31,985,000	98.43	100,00	-	-	-	31,985,000	98.43	100,00	510,400			
1	06	01	2.02								4,147,089,786	-	4,147,089,786	3,290,332,069	79.34	63,90	-	-	-	3,290,332,069	79.34	63,90	856,757,717			
1	06	01	2.02	01							3,980,429,786	-	3,980,429,786	3,135,132,069	78.76	100,00	-	-	-	3,135,132,069	78.76	-	845,297,717			
					5	1	01				3,980,429,786	-	3,980,429,786	3,135,132,069	78.76	100,00	-	-	-	3,135,132,069	78.76	100,00	845,297,717			
					5	1	01	01	01	0001	1,451,490,000	-	1,451,490,000	1,309,487,840	90.22	100,00	-	-	-	1,309,487,840	90.22	100,00	142,002,160			
					5	1	01	01	02	0001	136,000,000	-	136,000,000	95,274,986	70.06	100,00	-	-	-	95,274,986	70.06	100,00	40,725,014			
					5	1	01	01	03	0001	155,000,000	-	155,000,000	87,430,000	56.41	100,00	-	-	-	87,430,000	56.41	100,00	67,570,000			
					5	1	01	01	04	0001	81,000,000	-	81,000,000	47,850,000	59.07	100,00	-	-	-	47,850,000	59.07	100,00	33,150,000			
					5	1	01	01	05	0001	48,040,000	-	48,040,000	32,760,000	68.19	100,00	-	-	-	32,760,000	68.19	100,00	15,280,000			
					5	1	01	01	06	0001	84,200,000	-	84,200,000	58,949,880	70.01	100,00	-	-	-	58,949,880	70.01	100,00	25,250,120			
					5	1	01	01	07	0001	30,700,000	-	30,700,000	5,900,134	19.22	100,00	-	-	-	5,900,134	19.22	100,00	24,799,866			
					5	1	01	01	08	0001	1,360,503	-	1,360,503	19,209	1.41	100,00	-	-	-	19,209	1.41	100,00	1,341,294			
					5	1	01	01	09	0001	169,204,930	-	169,204,930	53,701,049	31.74	100,00	-	-	-	53,701,049	31.74	100,00	115,503,881			
					5	1	01	01	10	0001	11,700,000	-	11,700,000	2,652,819	22.67	100,00	-	-	-	2,652,819	22.67	100,00	9,047,181			
					5	1	01	01	11	0001	12,844,252	-	12,844,252	7,958,395	61.96	100,00	-	-	-	7,958,395	61.96	100,00	4,885,857			
					5	1	01	02	01	0001	1,798,890,101	-	1,798,890,101	1,433,147,757	79.67	100,00	-	-	-	1,433,147,757	79.67	100,00	365,742,344			
1	06	01	2.02	02							166,660,000	-	166,660,000	155,200,000	93.12	100,00	-	-	-	155,200,000	93.12	100,00	11,460,000			
					5	1	01				148,420,000	-	148,420,000	136,960,000	92.28	100,00	-	-	-	136,960,000	92.28	100,00	11,460,000			
					5	1	01	03	07	0001	140,260,000	-	140,260,000	128,800,000	91.83	100,00	-	-	-	128,800,000	91.83	100,00	11,460,000			
					5	1	01	03	07	0002	8,160,000	-	8,160,000	8,160,000	100,00	100,00	-	-	-	8,160,000	100,00	100,00	-			
					5	1	02				18,240,000	-	18,240,000	18,240,000	100,00	100,00	-	-	-	18,240,000	100,00	100,00	-			
					5	1	02	02	01	0001	14,040,000	-	14,040,000	14,040,000	100,00	100,00	-	-	-	14,040,000	100,00	100,00	-			
					5	1	02	02	01	0008	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	100,00	100,00	-	-	-	4,200,000	100,00	100,00	-			
1	06	01	2.05								178,409,700	-	178,409,700	141,329,803	79.22	100,00	-	-	-	141,329,803	79.22	100,00	37,079,897			
1	06	01	2.05	02							50,379,700	-	50,379,700	48,229,700	95.73	100,00	-	-	-	48,229,700	95.73	100,00	2,150,000			
					5	1	02				50,379,700	-	50,379,700	48,229,700	95.73	100,00	-	-	-	48,229,700	95.73	100,00	2,150,000			
					5	1	02	01	01	0073	20,279,700	-	20,279,700	20,279,700	100,00	100,00	-	-	-	20,279,700	100,00	100,00	-			
					5	1	02	01	01	0076	30,100,000	-	30,100,000	27,950,000	92.86	100,00	-	-	-	27,950,000	92.86	100,00	2,150,000			
1	06	01	2.05	11							128,030,000	-	128,030,000	93,100,103	72.72	100,00	-	-	-	93,100,103	72.72	50.31	34,929,897			

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN KELOMPOK	JENIS OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)			
												BELANJA OPERASI			KEU (%)	BELANJA MODAL		KEU (%)	(Rp)		(%)		
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	128,030,000	-	128,030,000	93,100,103	72.72	100,00	-	-	-	93,100,103	72.72	50.31	34,929,897	
					5 1 02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	48,000,000	-	48,000,000	38,450,067	80.10	100,00	-	-	-	38,450,067	80.10	100,00	9,549,933	
					5 1 02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80,030,000	-	80,030,000	54,650,036	68.29	100,00	-	-	-	54,650,036	68.29	52.46	25,379,964	
1	06	01	2.06						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	397,656,450	124,062,500	521,718,950	381,379,508	95.91	100,00	-	-	-	490,679,508	94.05	100,00	31,039,442	
1	06	01	2.06	01					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,004,000	-	12,004,000	9,800,000	81.64	100,00	-	-	-	9,800,000	81.64	100,00	2,204,000	
					5 1 02				Belanja Barang dan Jasa	12,004,000	-	12,004,000	9,800,000	81.64	100,00	-	-	-	9,800,000	81.64	100,00	2,204,000	
					5 1 02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12,004,000	-	12,004,000	9,800,000	81.64	100,00	-	-	-	9,800,000	81.64	100,00	2,204,000	
1	06	01	2.06	02					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,598,900	-	177,661,400	46,716,600	87.16	100,00	-	-	-	156,016,600	87.82	100,00	21,644,800	
					5 1 02				Belanja Barang dan Jasa	48,098,900	-	48,098,900	42,716,600	88.81	100,00	-	-	-	46,716,600	97.13	97.13	1,382,300	
					5 1 02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor	7,140,000	-	7,140,000	6,850,000	95.94	100,00	-	-	-	6,850,000	95.94	100,00	290,000	
					5 1 02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	33,860,900	-	33,860,900	28,768,600	84.96	100,00	-	-	-	28,768,600	84.96	100,00	5,092,300	
					5 1 02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2,250,000	-	2,250,000	2,250,000	100	100,00	-	-	-	2,250,000	100,00	100,00	-	
					5 1 02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,848,000	-	4,848,000	4,848,000	100	100,00	-	-	-	4,848,000	100,00	100,00	-	
					5 1 02				Belanja Barang dan Jasa	5,500,000	-	5,500,000	4,000,000	73	100,00	-	-	-	4,000,000	72.73	100,00	1,500,000	
					5 1 02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	600,000	-	600,000	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	600,000	
					5 1 02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	83	100,00	-	-	-	2,000,000	83.33	100,00	400,000	
					5 1 02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,500,000	-	2,500,000	2,000,000	80	100,00	-	-	-	2,000,000	80,00	100,00	500,000	
					5 2 02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	124,062,500	124,062,500	-	-	100,00	109,300,000	88.10	37.20	109,300,000	88.10	37.20	14,762,500	
					5 2 02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	1,700,000	-	1,700,000	1,500,000	-	100,00	-	-	-	1,500,000	-	-	200,000	
					5 2 02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-	2,300,000	88.46	100,00	2,300,000	88.46	100,00	300,000	
					5 2 02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Dapur	8,200,000	-	8,200,000	-	-	-	7,250,000	88.41	100,00	7,250,000	88.41	100,00	950,000	
					5 2 02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5,562,500	-	5,562,500	-	-	-	4,800,000	86.29	100,00	4,800,000	86.29	100,00	762,500	
					5 2 02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-	77,700,000	86.33	31.15	77,700,000	86.33	31.15	12,300,000	
					5 2 02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	15,750,000	98.44	100	15,750,000	98.44	100,00	250,000	
1	06	01	2.06	03					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	100,00	100,00	-	-	-	15,000,000	100,00	100,00	-	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	100,00	100,00	-	-	-	15,000,000	100,00	100,00	-	
					5 1 02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	100,00	100,00	-	-	-	15,000,000	100,00	100,00	-	
1	06	01	2.06	04					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41,255,550	-	41,255,550	41,164,900	99.78	100,00	-	-	-	41,164,900	99.78	100,00	90,650	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	41,255,550	-	41,255,550	41,164,900	99.78	100,00	-	-	-	41,164,900	99.78	100,00	90,650	
					5 1 02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,601,500	-	16,601,500	16,557,400	99.73	100,00	-	-	-	16,557,400	99.73	100,00	44,100	
					5 1 02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	22,054,000	-	22,054,000	22,054,000	100,00	100,00	-	-	-	22,054,000	100,00	100,00	-	
					5 1 02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan	2,600,050	-	2,600,050	2,553,500	98.21	100,00	-	-	-	2,553,500	98.21	100,00	46,550	
1	06	01	2.06	05					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,000,000	-	21,000,000	20,455,500	97.41	100,00	-	-	-	20,455,500	97.41	100,00	544,500	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	21,000,000	-	21,000,000	20,455,500	96.15	100,00	-	-	-	20,455,500	97.41	100,00	544,500	
					5 1 02	01	01	0024	Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21,000,000	-	21,000,000	20,455,500	97.41	100,00	-	-	-	20,455,500	97.41	100,00	544,500	
1	06	01	2.06	06					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,488,000	-	7,488,000	7,200,000	96.15	100,00	-	-	-	7,200,000	96.15	100,00	288,000	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	7,488,000	-	7,488,000	7,200,000	96.15	100,00	-	-	-	7,200,000	96.15	100,00	288,000	
					5 1 02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,488,000	-	7,488,000	7,200,000	96.15	100,00	-	-	-	7,200,000	96.15	100,00	288,000	
1	06	01	2.06	08					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	69,610,000	-	69,610,000	67,970,000	97.64	100,00	-	-	-	67,970,000	97.64	100,00	1,640,000	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	69,610,000	-	69,610,000	67,970,000	97.64	100,00	-	-	-	67,970,000	97.64	100,00	1,640,000	
					5 1 02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57,610,000	-	57,610,000	56,125,000	97.42	100,00	-	-	-	56,125,000	97.42	100,00	1,485,000	
					5 1 02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,200,000	-	6,200,000	6,075,000	97.98	100,00	-	-	-	6,075,000	97.98	100,00	125,000	
					5 1 02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5,800,000	-	5,800,000	5,770,000	99.48	100,00	-	-	-	5,770,000	99.48	100,00	30,000	
1	06	01	2.06	09					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177,700,000	-	177,700,000	173,072,508	97.40	100,00	-	-	-	173,072,508	97.40	100,00	4,627,492	
					5 1 02				Belanja Barang Jasa	177,700,000	-	177,700,000	173,072,508	97.40	100,00	-	-	-	173,072,508	97.40	100,00	4,627,492	
					5 1 02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	177,700,000	-	177,700,000	173,072,508	97.40	100,00	-	-	-	173,072,508	97.40	100,00	4,627,492	

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		SUB RINCIAN OBJEK	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)
															BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
1	06	01	2.07								Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1,079,380,000	1,079,380,000	-	-	-	1,069,057,237	99.04	100,00	1,069,057,237	99.04	100,00	10,322,763
1	06	01	2.07	02							Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	55,096,000	91.83	100.0	55,096,000	91.83	100.00	4,904,000
					5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	55,096,000	91.83	100.0	55,096,000	91.83	100.00	4,904,000
					5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-	55,096,000	91.83	100.0	55,096,000	91.83	100.00	4,904,000
1	06	01	2.07	05							Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	105,130,000	105,130,000	-	-	-	103,050,000	98.02	100,00	103,050,000	98.02	100,00	2,080,000
					5	2	02				Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	105,130,000	105,130,000	-	-	-	99,850,000	94.98	100,00	99,850,000	94.98	100,00	5,280,000
					5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	-	101,900,000	101,900,000	-	-	-	99,850,000	97.99	100,00	99,850,000	97.99	100,00	2,050,000
					5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	3,230,000	3,230,000	-	-	-	3,200,000	99.07	100,00	3,200,000	99.07	100,00	30,000
					5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	-	3,230,000	3,230,000	-	-	-	3,200,000	99.07	100,00	3,200,000	99.07	100,00	30,000
1	06	01	2.07	09							Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	847,000,000	847,000,000	-	-	-	844,681,237	99.73	100,00	844,681,237	99.73	100,00	2,318,763
					5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Kantor	-	847,000,000	847,000,000	-	-	-	844,681,237	99.73	100,00	844,681,237	99.73	100,00	2,318,763
					5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	847,000,000	847,000,000	-	-	-	844,681,237	99.73	100,00	844,681,237	99.73	100,00	2,318,763
1	06	01	2.07	10							Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	67,250,000	67,250,000	-	-	-	66,230,000	98.48	100,00	66,230,000	98.48	100,00	1,020,000
					5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	67,250,000	67,250,000	-	-	-	66,230,000	98.48	100,00	66,230,000	98.48	100,00	1,020,000
					5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	60,250,000	60,250,000	-	-	-	59,780,000	99.22	100,00	59,780,000	99.22	100,00	470,000
					5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	7,000,000	7,000,000	-	-	-	6,450,000	92.14	100,00	6,450,000	92.14	100,00	550,000
1	06	01	2.08								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502,144,911	-	502,144,911	460,941,558	91.79	100,00	-	-	-	460,941,558	91.79	100,00	41,203,353
1	06	01	2.08	01							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100,00	100,00	-	-	-	3,000,000	100,00	100,00	-
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100,00	100,00	-	-	-	3,000,000	100,00	100,00	-
					5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	100,00	100,00	-	-	-	3,000,000	100,00	100,00	-
1	06	01	2.08	02							Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76,986,860	-	76,986,860	45,442,098	59.03	100,00	-	-	-	45,442,098	59.03	100,00	31,544,762
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	76,986,860	-	76,986,860	45,442,098	59.03	100,00	-	-	-	45,442,098	59.03	100,00	31,544,762
					5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik	2,600,000	-	2,600,000	2,449,440	94.21	100,00	-	-	-	2,449,440	94.21	100,00	150,560
					5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	1,841,250	-	1,841,250	172,000	9.34	100,00	-	-	-	172,000	9.34	100,00	1,669,250
					5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	52,592,800	-	52,592,800	32,668,617	62.12	100,00	-	-	-	32,668,617	62.12	100,00	19,924,183
					5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19,952,810	-	19,952,810	10,152,041	50.88	100,00	-	-	-	10,152,041	50.88	100,00	9,800,769
1	06	01	2.08	04							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422,158,051	-	422,158,051	412,499,460	97.71	100,00	-	-	-	412,499,460	97.71	0.00	9,658,591
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	422,158,051	-	422,158,051	412,499,460	97.71	100,00	-	-	-	412,499,460	97.71	97.71	9,658,591
					5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	225,891,432	-	225,891,432	225,891,432	100,00	100,00	-	-	-	225,891,432	100,00	100,00	-
					5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	125,495,240	-	125,495,240	125,495,240	100,00	100,00	-	-	-	125,495,240	100,00	100,00	-
					5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25,099,048	-	25,099,048	25,099,048	100,00	100,00	-	-	-	25,099,048	100,00	100,00	-
					5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	7,024,762	-	7,024,762	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	7,024,762
					5	1	02	02	01	0037	Belanja Medical Check Up	5,535,000	-	5,535,000	3,444,000	62.22	100,00	-	-	-	3,444,000	62.22	100,00	5,535,000
					5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	29,882,619	-	29,882,619	29,392,740	98.36	100,00	-	-	-	29,392,740	98.36	100,00	489,879
					5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	1,436,550	-	1,436,550	1,413,000	98.36	100,00	-	-	-	1,413,000	98.36	100,00	23,550
					5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,793,400	-	1,793,400	1,764,000	98.36	100,00	-	-	-	1,764,000	98.36	100,00	29,400
1	06	01	2.09								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333,879,900	-	333,879,900	308,312,092	92.34	100,00	-	-	-	308,312,092	92.34	100,00	25,567,808
1	06	01	2.09	01							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177,860,000	-	177,860,000	172,394,397	96.93	100,00	-	-	-	172,394,397	96.93	100,00	5,465,603
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	177,860,000	-	177,860,000	172,394,397	96.93	100,00	-	-	-	172,394,397	96.93	100,00	5,465,603
					5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,950,000	-	3,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	11,200,000	-	11,200,000	10,507,200	93.81	100,00	-	-	-	10,507,200	93.81	100,00	692,800
					5	1	02	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	127,000,000	-	127,000,000	126,540,000	99.64	100,00	-	-	-	126,540,000	99.64	100,00	460,000
					5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35,710,000	-	35,710,000	35,347,197	98.98	100,00	-	-	-	35,347,197	98.98	100,00	362,803
1	06	01	2.09	02							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,394,900	-	46,394,900	46,214,495	99.61	100,00	-	-	-	46,214,495	99.61	100,00	180,405

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
					5 1 02					Belanja Barang Jasa	46,394,900	-	46,394,900	46,214,495	99.61	100,00				46,214,495	99.61	100,00	180,405
1	06	01	2.09	06		5 1 02	01 01		0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46,394,900	-	46,394,900	46,214,495	99.61	100,00				46,214,495	99.61	100,00	180,405
										Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,640,000	-	18,640,000	18,640,000	100,00	100,00	-	-	-	18,640,000	100,00	100,00	-
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	18,640,000	-	18,640,000	18,640,000	100,00	100,00	-	-	-	18,640,000	100,00	100,00	-
						5 1 02	03 02		0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor -Alat Kantor Lainnya	18,640,000	-	18,640,000	18,640,000	100,00	100,00	-	-	-	18,640,000	100,00	100,00	-
1	06	01	2.09	11						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	90,985,000	-	90,985,000	71,063,200	78.10	100,00	-	-	-	71,063,200	78.10	100,00	19,921,800
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	90,985,000	-	90,985,000	7,771,000	8.54	100,00	-	-	-	7,771,000	8.54	100,00	83,214,000
						5 1 02	01 01		0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,000,000	-	3,000,000	2,981,000	99.37	100,00	-	-	-	2,981,000	99.37	100,00	19,000
						5 1 02	01 01		0038	Belanja Obat-Obatan Lainnya	1,800,000	-	1,800,000	1,790,000	99.44	100,00	-	-	-	1,790,000	99.44	100,00	10,000
						5 1 02	02 01		0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4,500,000	-	4,500,000	3,000,000	66.67	100,00	-	-	-	3,000,000	66.67	100,00	1,500,000
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	81,685,000	-	81,685,000	63,292,200	77.48	100,00	-	-	-	63,292,200	77.48	100,00	18,392,800
						5 1 02	03 03		0001	Belanja Peliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja -Bangunan Gedung Kantor	81,685,000	-	81,685,000	63,292,200	77.48	100,00	-	-	-	63,292,200	77.48	100,00	18,392,800
1	06	02								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	260,870,000	-	260,870,000	259,429,800	99.45	100,00				259,429,800	99.45	100,00	1,440,200
1	06	02	2.01							Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1	06	02	2.01	01						Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
						5 1 02	04 01		0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
						5 1 02	04 01		0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
1	06	02	2.03							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	260,870,000	-	260,870,000	259,429,800	99.45	100,00				259,429,800	99.45	100,00	
1	06	02	2.03	03						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120,870,000	-	120,870,000	120,618,500	99.79	100,00	-	-	-	120,618,500	99.79	100,00	251,500
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	120,870,000	-	120,870,000	120,618,500	99.79	100,00	-	-	-	120,618,500	99.79	100,00	251,500
						5 1 02	01 01		0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	14,970,000	-	14,970,000	14,970,000	100,00	100,00	-	-	-	14,970,000	100,00	100,00	-
						5 1 02	02 01		0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	100,00	100,00	-	-	-	90,000,000	100,00	100,00	-
						5 1 02	04 01		0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,900,000	-	15,900,000	15,648,500	98.42	100,00	-	-	-	15,648,500	98.42	100,00	251,500
1	06	02	2.03	04						Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	140,000,000	-	140,000,000	138,811,300	99.15	100,00	-	-	-	138,811,300	99.15	100,00	1,188,700
						5 1 05				Belanja Hibah	140,000,000	-	140,000,000	138,811,300	99.15	100,00	-	-	-	138,811,300	99.15	100,00	1,188,700
						5 1 05	05 01		0001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	140,000,000	-	140,000,000	138,811,300	99.15	100,00	-	-	-	138,811,300	99.15	100,00	1,188,700
1	06	03								PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	62,500,000	-	62,500,000	52,825,000	84.52	100,00				52,825,000	84.52	100,00	9,675,000
1	06	03	2.01							Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	62,500,000	-	62,500,000		84.52		-	-	-	52,825,000	84.52	100,00	9,675,000
													52,825,000		100,00								
1	06	03	2.01	01						Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	62,500,000	-	62,500,000		84.52		-	-	-	52,825,000	84.52	100,00	9,675,000
						5 1 02				Belanja Barang Jasa	22,500,000	-	22,500,000	20,615,000	91.62	100,00	-	-	-	20,615,000	91.62	100,00	1,885,000
						5 1 02	01 01		0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,500,000	-	22,500,000	20,615,000	91.62	100,00				20,615,000	91.62	100,00	1,885,000
						5 1 06				Belanja Bantuan Sosial	40,000,000	-	40,000,000	32,210,000	80.53	100,00				32,210,000	80.53	100,00	7,790,000
						5 1 06	01 01		0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircanakan kepada Individu	40,000,000	-	40,000,000	32,210,000	80.53	100,00				32,210,000	80.53	100,00	7,790,000
1	06	04								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	455,522,744	-	455,522,744	315,171,250	69.19	100,00				315,171,250	69.19	100,00	140,351,494

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK		SUB RINCIAN OBJEK	BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)
															BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
1	06	04	2.01								Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	236,160,000	-	236,160,000	169,799,500	71.90	100,00				169,799,500	71.90	100,00	66,360,500
1	06	04	2.01	03							Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	50,100,000		50,100,000	44,938,000	89.70	100,00				44,938,000	89.70	100,00	5,162,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	22,600,000		22,600,000	17,838,000	78.93	100,00				17,838,000	78.93	100,00	4,762,000
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,200,000		21,200,000	17,418,000	82.16	100,00				17,418,000	82.16	100,00	3,782,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,400,000		1,400,000	420,000	30.00	100,00				420,000		100,00	980,000
					5	1	06				Belanja Bantuan Sosial	27,500,000		27,500,000	27,100,000	98.55	100,00				27,100,000	98.55	100,00	400,000
					5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	7,500,000		7,500,000	7,500,000	100.00	100.00				7,500,000	100.00	100.00	-
					5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	20,000,000		20,000,000	19,600,000					19,600,000				400,000
1	06	04	2.01	03							Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	70,000,000	-	70,000,000	51,418,000	73.45	100,00				51,418,000	73.45	100,00	18,582,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	27,600,000		27,600,000	14,618,000	52.96	100,00				14,618,000	52.96	100,00	12,982,000
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,800,000	-	24,800,000	14,618,000	58.94	100,00				14,618,000	58.94	100,00	10,182,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	-	2,800,000	-	-				-				2,800,000
					5	1	06				Belanja Bantuan Sosial	42,400,000		42,400,000	36,800,000	86.79	100,00				36,800,000	86.79	100,00	5,600,000
					5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	42,400,000	-	42,400,000	36,800,000	86.79	100,00				36,800,000	86.79	100,00	5,600,000
1	06	04	2.01	05							Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24,400,000	-	24,400,000	12,590,000	51.60	100,00	-	-	-	12,590,000	51.60	100,00	11,810,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	24,400,000		24,400,000	12,590,000	51.60	100,00				12,590,000	18.75	100,00	11,810,000
					5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,400,000	-	10,400,000	1,950,000	18.75	100,00	-	-	-	1,950,000	18.75	100,00	8,450,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,000,000		14,000,000	10,640,000	76.00	100,00				10,640,000	76.00	100,00	3,360,000
1	06	04	2.01	06							Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	23,470,000	-	23,470,000	13,072,500	55.70	100,00				13,072,500	55.70	100,00	10,397,500
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	23,470,000		23,470,000	13,072,500	55.70	100,00	-	-	-	13,072,500	55.70	100,00	10,397,500
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,670,000	-	20,670,000	12,792,500	61.89	100,00	-	-	-	12,792,500	61.89	100,00	7,877,500
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000		2,800,000	280,000	10.00	100,00				280,000	10.00	100,00	2,520,000
1	06	04	2.01	07							Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,800,000	-	2,800,000	1,540,000	55.00	100,00	-	-	-	1,540,000	55.00	100,00	1,260,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	2,800,000	-	2,800,000	1,540,000	55.00	100,00	-	-	-	1,540,000	55.00	100,00	1,260,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000		2,800,000	1,540,000	55.00	100,00	-	-	-	1,540,000	55.00	100,00	1,260,000
1	06	04	2.01	08							Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13,740,000	-	13,740,000	4,250,000	30.93	100,00				4,250,000	30.93	100,00	9,490,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	13,740,000	-	13,740,000	4,250,000	30.93	100,00	-	-	-	4,250,000	30.93	100,00	9,490,000
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,540,000		9,540,000	2,610,000	27.36	100,00				2,610,000	27.36	100,00	6,930,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000		4,200,000	1,640,000	39.05	100,00	-	-	-	1,640,000	39.05	100,00	2,560,000
1	06	04	2.01	09							Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	51,650,000		51,650,000	41,991,000	81.30	100,00	-	-	-	41,991,000	81.30	100,00	9,659,000
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	51,650,000		51,650,000	41,991,000	81.30	100,00	-	-	-	41,991,000	81.30	100,00	9,659,000
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,170,000		47,170,000	40,171,000	85.16	100,00	-	-	-	40,171,000	85.16	100,00	6,999,000
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,480,000		4,480,000	1,820,000	40.63	100,00	-	-	-	1,820,000	40.63	100,00	2,660,000
1	06	04	2.02								Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	219,362,744	-	219,362,744	145,371,750	66.27	100,00				145,371,750	66.27	100,00	73,990,994
1	06	04	2.02	03							Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	69,850,000	-	69,850,000	66,165,250	94.72	100,00				66,165,250	94.72	100,00	3,684,750
					5	1	02				Belanja Barang Jasa	21,350,000		21,350,000	19,959,250	93.49	100,00				19,959,250	93.49	100,00	1,390,750
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,550,000	-	18,550,000	15,219,250	82.04	100,00				15,219,250	82.04	100,00	3,330,750
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	-	2,800,000	4,740,000	169.29	100,00				4,740,000	169.29	-	(1,940,000)
					5	1	06				Belanja Bantuan Sosial	48,500,000		48,500,000	46,206,000	95.27	100,00				46,206,000	95.27	100,00	2,294,000

KODE REKENING										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKUN KELOMPOK	JEMIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)		
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)				
					5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	1,215,000,000		1,215,000,000	757,500,000	62.35	100,00	-	-	-	757,500,000	62.35	100,00	457,500,000		
					5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircencanakan Kepada Individu	1,215,000,000	1,215,000,000	757,500,000	62.35	100,00	-	-	-	757,500,000	62.35	100,00	457,500,000		
1	06	06								PROGRAM PENANGANAN BENCANA	368,773,100	-	368,773,100	338,546,624	91.80	100,00				338,546,624	91.80	100,00	30,226,476		
1	06	06	2.01							Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	199,318,100	-	199,318,100	174,926,624	87.76	100,00	-	-	-	174,926,624	87.76	100,00	24,391,476		
1	06	06	2.01	01						Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	199,318,100	-	199,318,100	174,926,624	87.76	100,00	-	-	-	174,926,624	87.76	100,00	24,391,476		
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	79,293,800	-	79,293,800	61,191,124	77.17	100,00				61,191,124	77.17	100,00	18,102,676		
					5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10,493,800		10,493,800	1,200,000										
					5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	15,900,000	-	15,900,000	13,050,000	82.08	100,00	-	-	-	13,050,000	82.08	100,00	2,850,000	
					5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4,080,000	-	4,080,000	3,680,000	90.20	100,00				3,680,000	90.20	100,00	400,000	
					5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7,000,000		7,000,000	3,300,000	47.14	100,00				3,300,000	47.14	100,00	3,700,000	
					5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,480,000		37,480,000	35,881,124	95.73	100,00				35,881,124	95.73	100,00	1,598,876	
					5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dalam Kota	4,340,000		4,340,000	4,080,000	94.01	100,00				4,080,000	94.01	100,00	260,000	
					5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	120,024,300	-	120,024,300	113,735,500	94.76	100,00				113,735,500	94.76	100,00	6,288,800		
					5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	82,972,800		82,972,800	79,300,000	95.57	100,00				79,300,000	95.57	100,00	3,672,800	
					5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga	37,051,500		37,051,500	34,435,500	92.94	100,00				34,435,500	92.94	100,00	2,616,000	
1	06	06	2.02							Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bendana Kabupaten/Kota	169,455,000	-	169,455,000	163,620,000	96.56	100,00	-	-	-	163,620,000	96.56	100,00	5,835,000		
1	06	06	2.02	02						Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	169,455,000	-	169,455,000	163,620,000	96.56	100,00	-	-	-	163,620,000	96.56	100,00	5,835,000		
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	49,455,000	-	49,455,000	43,620,000	88.20	100,00	-	-	-	43,620,000	88.20	100,00	5,835,000		
					5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,880,000		29,880,000	27,195,000	91.01	100,00	-	-	-	27,195,000	91.01	100,00	2,685,000	
					5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	19,575,000	-	19,575,000	16,425,000	83.91	100,00	-	-	-	16,425,000	83.91	100,00	3,150,000	
					5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	100,00	100,00	-	-	-	120,000,000	100,00	100,00	-		
					5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircencanakan kepada Keluarga	120,000,000	-	120,000,000	120,000,000	100,00	100,00	-	-	-	120,000,000	100,00	100,00	-	
1	06	07								PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	157,995,850	12,000,000	169,995,850	149,599,630	94.69	100,00		11,700,000	-	169,307,480	99.60	62.30	688,370		
1	06	07	2.01							Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	157,995,850	12,000,000	169,995,850	149,599,630	94.69	100,00		11,700,000	-	169,307,480	99.60	100,00	688,370		
1	06	07	2.01	02						Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	157,995,850	-	157,995,850	149,599,630	94.69	100,00			-	169,307,480	107.16	100,00	(11,311,630)		
					5	1	02			Belanja Barang Jasa	137,995,850	-	137,995,850	129,599,630	93.92	100,00				137,607,480	99.72	100,00	388,370		
					5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,207,850		4,207,850	4,207,850					4,207,850			-		
					5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18,880,000		18,880,000	18,880,000	100.0	100,00				18,880,000			-	
					5	1	02	02	04	0118	Belanja Sewa Mebel	1,000,000		1,000,000	1,000,000					1,000,000			-		
					5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800,000		800,000	800,000					800,000			-		
					5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,000,000		2,000,000	2,000,000					2,000,000			-		
					5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	111,108,000	-	111,108,000	110,719,630	99.65	100,00			-	110,719,630	99.65	100,00	388,370	
					5	1	06			Belanja Bantuan Sosial	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100,00	100,00			-	20,000,000	100,00	100,00	-		
					5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Dircencanakan kepada individu	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100,00	100,00	-	-	-	20,000,000	100,00	100,00	-	
					5	2	02			Belanja Modal	-	12,000,000	12,000,000		-			11,700,000	97.50	100,00	11,700,000	97.50	100,00	300,000	
					5	2	02	05	02	00003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	12,000,000	12,000,000		-			11,700,000	97.50	100,00	11,700,000	97.50	100,00	300,000
JUMLAH BELANJA											9,405,538,641	1,230,442,500	10,635,981,141	6,966,139,584	74.06	61,20	1,190,057,237	96.72	66,70	8,165,604,671	76.77	100,00	2,470,376,470		

Yang bertanggungjawab terhadap Pelaporan ini :
Nama : Apriana, S.Pi, M.Pi
Nomor HP : 0812 5098 161

Sampit, Desember 2023
Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Kotawaringin Timur

WYONO, S.E.
Pensiun
NIP. 19671010 199403 1 013

SARANA DAN PRASARANA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWRAINGIN TIMUR

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	4	1,175,135,500	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen	1	509,500,000	Baik
3	Tanah Untuk Makam Pahlawan	2	262,635,500	Baik
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	120,000,000,000	Baik
5	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	320,050,000	Baik
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	436,160,000	Baik
7	Kendaraan Bermotor Ruda Dua	9	168,772,345	Baik
8	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	26,553,000	Baik
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	87	240,212,798	Baik
10	Alat Pembersih	6	32,612,344	Baik
11	Alat Pendingin	17	73,018,052	Baik
12	Alat Dapur	8	6,274,400	Baik
13	Alat rumah tangga lainnya	10	13,167,000	Baik
14	Meja dan Kursi Kerja Rapat/Pejabat	33	49,618,000	Baik
15	Meja Kerja Pejabat	11	19,810,000	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	18	21,822,000	Baik
17	Alat Studio	4	30,142,200	Baik
18	Alat Studio	3	26,292,200	Baik
19	Alat Laboratorium	37	19,902,500	Baik
20	Alat Laboratorium Geofisika	32	16,000,000	Baik
21	Komputer	74	413,894,006	Baik
22	Alat Komputer	43	104,850,438	Baik
23	Personal komputer	42	93,100,438	Baik
24	Gedung dan Bangunan	27	6,690,215,752	Baik
25	Bangunan Gedung	23	6,458,338,752	Baik
26	Monumen	4	231,877,000	Baik
27	Tugu	3	175,912,000	Baik
28	Makam Bersejarah	1	55,965,000	Baik
Total		509	137,671,831,225	



Daftar Pengadaan Barang
Periode 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

KABUPATEN / KOTA
PROVINSI

: Kabupaten Kotawaringin Timur
: KALIMANTAN TENGAH

No		Kuitansi/Kontrak		Nilai		
		Tanggal	Nomor			
Urut	Nama / Jenis Barang	Tanggal	Nomor	Perolehan Total	Jenis Kontrak	Keterangan
[09.01.01.01] DINAS SOSIAL						
1	No Kontrak : 11.a/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Mesin Pemotong Rumput	5/29/2023	11.a/SP/PPK/DINSOS/2023	2.800.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT PEMBERSIH MESIN POTONG RUMPUT
2	Mesin Pemotong Rumput	5/29/2023	11.a/SP/PPK/DINSOS/2023	8.900.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT PEMBERSIH MESIN POTONG RUMPUT
Total				11.700.000,00		
2	No Kontrak : 13/SP//PPK/DINSOS/2023					
1	Meubelair Lain-lain	5/22/2023	13/SP//PPK/DINSOS/2023	48.000.000,00	Aset Baru	PENGADAAN BACKDROP AULA DINAS
Total				48.000.000,00		
3	No Kontrak : 04/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Sepeda Motor	2/28/2023	04/SP/PPK/DINSOS/2023	27.548.000,00	Aset Baru	PENGADAAN SEPEDA MOTOR
2	Sepeda Motor	2/28/2023	04/SP/PPK/DINSOS/2023	27.548.000,00	Aset Baru	PENGADAAN SEPEDA MOTOR
Total				55.096.000,00		
4	No Kontrak : 12/SP//PPK/DINSOS/2023					
1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	3.150.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	3.150.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	3.150.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	3.150.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	3.150.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
6	Lap Top	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	13.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
7	Lap Top	5/22/2023	12/SP//PPK/DINSOS/2023	13.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP DAN PRINTER
Total				42.750.000,00		
5	No Kontrak : 09.A/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Loudspeaker	3/6/2023	09.A/SP/PPK/DINSOS/2023	19.050.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
2	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	3/6/2023	09.A/SP/PPK/DINSOS/2023	4.480.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
3	Televisi	3/6/2023	09.A/SP/PPK/DINSOS/2023	14.900.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
4	Microphone	3/6/2023	09.A/SP/PPK/DINSOS/2023	2.600.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
5	Microphone Floor Stand	3/6/2023	09.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA
Total				44.530.000,00		

6	No Kontrak : 01/SP-T/DINSOS/2023					
1	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	6/21/2023	01/SP-T/DINSOS/2023	844.681.237,00	Kapitalisasi	REHAB BANGUNAN RUMAH SINGGAH NILAI 728.605.237, PERENCANAAN NO KONTRAK 027/02/SPK/DINSOS/2023 DENGAN NILAI 71.537.000, DAN PENGAWASAN NOMOR 16/SPK/DINSOS/2023 NILAI 44.539.000
Total				844.681.237,00		
7	No Kontrak : 50/ESP/PPK/DINSOS/2023					
1	Handy Cam	11/23/2023	50/ESP/PPK/DINSOS/2023	15.250.000,00	Aset Baru	PENGADAAN SONY HANDYCAM FDR-AX43A
Total				15.250.000,00		
8	No Kontrak : 50.A/ESP/PPK/DINSOS/2023					
1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	11/23/2023	50.A/ESP/PPK/DINSOS/2023	6.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN SCANNER ADS-1200
Total				6.450.000,00		
9	No Kontrak : 25/BAST/PPK/2023					
1	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
2	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
3	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
4	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
5	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
6	Lap Top	12/12/2023	25/BAST/PPK/2023	8.450.000,00	Aset Baru	PENGADAAN LAPTOP AXIOO MYBOOK PRO K5 (8N2)
Total				50.700.000,00		
10	No Kontrak : 020/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-lain	11/3/2023	020/SP/PPK/DINSOS/2023	3.200.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR
2	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-lain	11/3/2023	020/SP/PPK/DINSOS/2023	1.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR
Total				4.700.000,00		
11	No Kontrak : 020.A/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
2	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
3	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL

4	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
5	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
6	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	1.750.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
7	Kursi Besi/Metal	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	2.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
8	Kursi Besi/Metal	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	2.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
9	Kursi Besi/Metal	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	2.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
10	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	5.000.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
11	Meubelair Lain-lain	11/3/2023	020.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN MEUBELAIR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
Total				35.250.000,00		
12	No Kontrak : 018/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Lemari Es	11/3/2023	018.SP/PPK/DINSOS/2023	2.300.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT PENDINGIN LEMARI ES
Total				2.300.000,00		
13	No Kontrak : 018.A/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	11/3/2023	018.A/SP/PPK/DINSOS/2023	1.300.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT ALAT RUMAH TANGGAH
2	Televisi	11/3/2023	018.A/SP/PPK/DINSOS/2023	3.500.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT ALAT RUMAH TANGGAH
Total				4.800.000,00		
14	No Kontrak : 018.B/SP/PPK/DINSOS/2023					
1	Alat Dapur Lain-lain	11/3/2023	018.B/SP/PPK/DINSOS/2023	3.100.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT DAPUR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
2	Alat Dapur Lain-lain	11/3/2023	018.B/SP/PPK/DINSOS/2023	3.100.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT DAPUR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
3	Rak Piring Aluminium	11/3/2023	018.B/SP/PPK/DINSOS/2023	1.050.000,00	Aset Baru	PENGADAAN ALAT DAPUR DI RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
Total				7.250.000,00		

DOKUMENTASI PROGRAM/KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TA. 2023

1. Penyaluran Bantuan Berupa Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepang



2. Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar

 Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu (Kursi Roda)

#bangga
melayani
bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu (Kursi Roda)

#bangga
melayani
bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyerahan Bantuan Sosial Berupa Alat Bantu (Tongkat)

#bangga
melayani
bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial (Alat Bantu dan Permakanaan) Kepada Beberapa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

#bangga
melayani
bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

3. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Akses Layanan Dasar

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berinisial "M" Untuk Di Rujuk Ke RS Murjani Sampit

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK? #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)

 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur



Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Berkoordinasi Dengan Pihak Puskesmas Boamang II Untuk Penanganan PMKS Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa An. Ervina

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK? HARATI #KEMENSOS Hadir

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Kepada Pihak Keluarga Setelah Menjalani Perawatan Di RS Murjani Sampit

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK? #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penanganan PPKS Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berinisial "N" di RSUD Murjani Sampit Untuk Mendapatkan Layanan Dasar

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK? #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)

4. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Dirujuk



5. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng Yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial



6. Fasilitas Pemulangan Warga Nega Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Pemulangan Orang Terlantar (OT) Ke Daerah Asal

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Pemulangan Orang Terlantar (OT) Ke Daerah Asal

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Pemulangan Orang Terlantar (OT) Ke Daerah Asal

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

7. Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Masyarakat

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyerahan Bantuan Sembako Untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Ketapang

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Korban Kebakaran di Kelurahan Kotabesi Hulu

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Korban Kebakaran di Desa Tinduk Kecamatan Baamang

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Mentawa Baru Hilir

#bangga melayani bangsa BerAKHLAK HARATI #dinsoskotim Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f [dinassosialkotim](#)

8. Penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) TA. 2023



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur

DINAS SOSIAL



Penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

#dinsoskotim
Siap Melayani!

Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id> IG : [dinassosialkotim](#) f : [dinassosialkotim](#)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln Jend. Sudirman No.1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp.(0531) 21006,21007, 21023,21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax(0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id Website : <http://www.kotimkab.go.id>

Sampit, 15 Desember 2023

Nomor : 050/ 1065 /Bappelitbangda-IV/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Penyerahan Penghargaan Inovasi Daerah

Yth Daftar Undangan Terlampir
di
Sampit

Sehubungan akan dilaksanakannya Rapat Internal Evaluasi Akhir Tahun 2023, yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas partisipasinya dalam pencapaian Indeks Inovasi Daerah, dengan ini Saudara (i) diundang selaku Inovator, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 20 Desember 2023
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Aula Sei Mentaya Kantor BAPPELITBANGDA
Kabupaten Kotawaringin Timur

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. FAJRUR RAHMAN,M.M

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan)
3. Arsip

Lampiran : Daftar Undangan
Nomor : 050/ 1065 /Bappelitbangda-IV/2023
Tanggal : 15 Desember 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotim (E- Retribusi dan Smart Tax Kotim).
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kotim (Si Terang Masif (Data Base Penerangan jalan Umum Menggunakan Sistem Informasi Geografis)
3. Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim (Tim Pangkas (Optimalisasi Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial)
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotim (GERAM RUNTING (Gerakan Bersama Berantas Stunting).
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kotim (BUSA PAUD dan Buku Karya Media Pembelajaran).
6. Kepala Dinas PUPR PRKP Kab. Kotim (PU – Siaga)
7. Kepala Dinas Pertanian Kab. Kotim (SIMPATIKTIRA (Sistem Informasi Pelaporan Statistik Pertanian Hortikultura)
8. Kecamatan Baamang/ Kel baamang Hilir (ENKAPE (Nampa Kamangat Pahari).
9. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (SiDaus Bandel) Pemanfaatan Digitalisasi Dalam Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan).
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat daerah Kab. Kotim (E-Beschikking (Penerbitan Keputusan Bupati Berbasis dalam Jaringan)
11. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (SI-GABUS (Sistem Informasi Penyewaan Gedung dan Bus, dan Si-MANGGA (Sistem Informasi Rumah Tangga)

PENGHARGAAN INOVASI TIM PANGKAS

(Optimalisasi Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)



FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE			KET
													KELUARGA/MASYARA KAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENYANDANG DISABILITAS																
1	JOKO PRASETYO	6202062607920004	L	WONOGIRI, 7/26/1992	JL. KENAN SANDAN RT.040 RW.007 KEL. BAAMANG TENGAH KEC. BAAMANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202050607180001		KAWIN	SOPIR	DISABILITAS MENTAL	KELUARGA		PENELANTARAN	
2	SUGIANTO	6202040809830001	L	SAMPIT, 08-09-1983	Jl. BRANTAS RT/RW 001/001 DESA BUKIT MAKMUR KEC. TUALAN HULU	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202162806130001		BELUM KAWIN	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL	KELUARGA			
3	SUBHAN	6202090606840001	L	KOTIM, 06-06-1984	Jl. DESA BAPINANG HIJIR LAUT RT 008 RW 003 DESA BAPINANG HIJIR LAUT KEC. PULAU HANAUT	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202091805082347		KAWIN	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL				
4	DWI INUK	6202054307830002	P	SAMPIT, 03-07-1981	Jl. DESA GANEPO RT 006 RW 003 DESA GANEPO, KEC. SERANAU	RUMAH	KEPALA KELUARGA	620212101218001		CERAI HIDUP	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				
5	WALNO SADEWO	3323170706870001	L	TEMANGGUNG, 07-06-1986	Jl. BUBUT RT 019 RW 004, KEL. GUNUNG MAKMUR KEC. ANTANG KALANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202101009190002		CERAI HIDUP	MEKANIK	DISABILITAS MENTAL				
6	MUHAMMAD SAIDI	6202060906910001	L	PELANGSIAN, 09-06-1991	Jl. PELANGSIAN I RT 015 RW 006 DESA PELANGSIAN KEC. MENTAWA BARU KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202061905080217		BELUM KAWIN	TIDAK BAKERJA	DISABILITAS MENTAL				
7	JUMARDIANUR	6202051003920004	L	SAMPIT, 10-03-1992	Jl. KIHAIJAR DEWANTARA NO.63 SAMPIT RT 021 RW 005 KEL. BAAMANG HIJIR KEC. BAAMANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202052803120012		BELUM KAWIN	TIDAK BAKERJA	DISABILITAS MENTAL				
8	WIWI MULYANINGSIH	6202034106960001	P	BANJAR BARU, 01-06-1996	Jl. IRIAN JAYA RT 017 RW 004 KEL. BERINGIN AGUNG, KEC. TELAGA ANTANG	RUMAH	ISTRI	6202170104210001		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				
9	BAHARUDIN	6202130903750001	L	PANTAI HARAPAN, 09-03-1975	Jl. DESA PANTAI HARAPAN, RT 003 RW 002 DESA PANTAI HARAPAN KEC. CEMPAGA HULU	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202132803230001		KAWIN	PETANI	DISABILITAS MENTAL				
10	DEWI MULIAWATI	6202044712970002	P	KABUAU, 07-12-1999	Jl. DESA KABUAU RT.001 RW.001 DESA KABUAU KEC. PARENGGEAN	RUMAH	ANAK	6202042504110004		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK	KELUARGA			
11	MELATI	6202065502900007	P	SAMPIT, 2/15/1990	Jl. TANAH MAS KEL. TANAH MAS BAAMANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202061502220002		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL	MASYARAKAT			
12	DANDI	6202152505000001	L	T. TAWAN,25-05-2000	DESA PELANGKONG KUALA KUAYAN KEC. MENTAYA HULU	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202151110190002		KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
13	SINYIN	6202105003000001	P	TUMBANG MANGKUP, 10-03-2000	Jl. DESA TUMBANG MANGKUP RT.001 RW.001 KEC. TELAGA ANTANG			6202101805081521	JALANAN	BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
14	ALI IMRON	6305090708890001	L	TALIKUR, 07-08-1989	DESA LINUH RT 4 RW 4 KECAMATAN BUNGUR KABUPATEN -TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LUAR KOTIM	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6305090407230002		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	TUNA WICARA				LUAR KOTIM
15	ABDUL AZIS	6202012305900001	L	KATATARI, 23-05-1990	Jl. MERANTI RT 004 RW 001 KEL. KOTA BESI HIJIR KEC. KOTA BESI	RUMAH	ANAK	6202011603110002		KAWIN	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL				
16	RONY RIFANY	6202051601880001	L	SAMPIT, 1/16/1980	Jl. CIKIL RIWUT KM.3 NO.01 RT.002 RW.001 KEL. BAAMANG BARAT KEC. BAAMANG		KEPALA KELUARGA	6202051706220005	YAYASAN JOINT ADULUM MINISTRI (JAM) PALANGKA RAYA	BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL	KELUARGA		PENELANTARAN	
17	SOGI	1801061510720005	L	JAWA TIMUR, 15-10-1972	Jl. DUSUN CINTA JAYA RT 003 RW 001 KEL. TAMAN AGUNG KEC. KALIANDA KAB. LAMPUNG SELATAN LUAR KOTIM	RUMAH	KEPALA KELUARGA	1801061610120033		CERAI MATI	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
18	MUHAMMAD ZAIDI	6202050107580045	L	KOTAWARINGIN TIMUR, 01-07-1958	Jl. WALTER CONDRAD No. 39 RT.012 RW.004 KELURAHAN BAAMANG HIJIR KEC. BAAMANG			6202050805230010	JALANAN	BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
19	AGAN	6202080107700067	L	Kotawaringin Timur,01/07/1970	Jl. Kelapa Muda RT/RW 013/003 Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202081905230002		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
20	PAHRUJI YATRI	6202060402000002	L	CEMPAKA MULIA BARAT, 04-02-2000	Jl. KUINI NO. 10 SAMPIT RT 013 RW 003 KEL. MENTAWA BARU HIJIR KEC. MB. KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202061011100018		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
21	KRISNA BAYU AJI	16012212122010001	L	JOMBANG, 12-12-2001	DUSUN II RT 004 RW 002 KEL. AIR WALL KEC. LUBUK BATANG KEC. OGAN KOMERING ULU SUMATRA BARAT LUAR KOTIM	RUMAH	ANAK	1601221303080027		BELUM KAWIN	KARYAWAN SWASTA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
22	MUHAMMAD ROSIDI	6202052205070009	L	KOTAWARINGIN TMUR, 22-05-2007	Jl. MUCHRAN ALI GG. POS POLISI SAMPIT RT 023 RW 004 KIEL BAAMANG TENGAH KEC. BAAMANG		KELUARGA	6202051805086484		BELUM KAWIN	TIDAK BAKERJA	DISABILITAS MENTAL				
23	BUDIANSYAH	6202071508870002	L	BAGENDANG HILIR, 15-08-1987	Jl. PADAT KARYA RT 003 RW 001 DESA BAGENDANG HIJIR KEC. MENTAYA HIJIR UTARA	RUMAH	ANAK	6202071202130001		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				

24	YULI	6202064107910039	P	SAMPIT, 01-07-1991	JL. ISKANDAR XXII SAMPIT RT 008 RW 002 KEL. KETAPANG KEC. MB. KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202060912100010		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
25	MURNI	6207015702910002	P	UPT. KATINGAN III, 17-02-1991	JL. JENDRAL SUDIRMAN KM.3 RT 043 RW 006 KEL. MB.HULU KEC. MB KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202061509210004		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
26	ANTONIUS	6202151212850002	L	TEWEI HARA, 12-12-1985	JL. DESA TEWEI HARA RT 001 RW 001 DESA TEWEI HARA KEC. BUKIT SANTUAI	RUMAH	ANAK	6202153107230001		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
27	NURHAYATI	6202064507790011	P	SAMPIT, 05-07-1979	JL. H.M ARSAYAD KM 11 RT 005 RW 002 DESA BANGKUNG MAKMUUR KEC. MB. KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202061811220010		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
28	ERVINA	6202066211830001	P	LAMONGAN,22-11-1983	JL. BIAK SAMPIT RT 030 RW RW 014 KEL. MB. HULU KEC. MB. KETAPANG	RUMAH	ANAK	6202061009090023		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				
29	BUDI	6202080701040001	L	SAMPIT, 07-01-2004	JL. HL. BAWIYAH RT 020 RW 007 BASIRIH HILIR, KEC. MENTAYA HILIR SELATAN			6202081805084445	PELABUHAN	BELUM KAWIN	TIDAK BAKERJA	DISABILITAS MENTAL				
30	WULAN	3173085503771002	P	BONDOWOSO, 15-03-1977	PERUMAHAN METROPOLITAN RT 022 RW 2 KEL. BAAMANG BARAT KEC. BAAMANG	RUMAH	ISTRI	3173082409180036		KAWIN	WIRASWASTA	DISABILITAS MENTAL				
31	SULFIA	6202034410780002	L	TANJUNG JARIANGAU, 10/4/1978	JL. DESA TANJUNG JARIANGAU RT. 003 RW.002 DESA TANJUNG JARIANGAU KEC. MENTAYA HULU	RUMAH	ANAK	6202032004220002		BELUM KAWIN	TIDAK BAKERJA	DISABILITAS MENTAL				
32	BADRUN	6211021804820002	L	PANDAN SARI, 09-07-1980	PANDAN SARI RT 008 RW 002 DESA SEI PUDAK/ PAPUYU III, KEC. KAHAYAN KUALA, KAB. PULANG PISAU LUAR KOTIM			meninggal		BELUM KAWIN	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
33	LULUK SRI RAHAYU	3505217107890004	P	BLITAR 31-07-1989	DUSUN SIDOMULYO RT 002 RW 003 DESA SIDOMULYO KEC. SELOREJO KAB. BLITAR LUAR KOTIM	RUMAH	ANAK	3505213006060095		BELUM KAWIN	WIRASWASTA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
34	DIAN RUSLI WIDODO	6202051003730002	L	BANDUNG, 10-03-1973	JL. SUKA BUMI NO 15 SAMPIT RT 011 RW 004 KEL. BAAMANG HILIR KEC. BAAMANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202050809110007		KAWIN	PENGACARA	DISABILITAS MENTAL				
35	MEXIONO	6202141604710001	L	SEBABI, 16-04-1971	JL. DESA SEBABI RT 007 RW - DESA SEBABI KEC. TELAWANG	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202141805080721		KAWIN	PETANI/BERKEBUN	DISABILITAS MENTAL				
36	ENDANG	6202144107630012	P	Kotim, 01/07/1963	Jl. Jend Sudirman KM.89 Desa Sebabi Kecamatan Telawang	RUMAH	KELUARGA LAIN	6202140509230001		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
37	ARIYANDI	6202051110930001	L	SAMPIT, 11-10-1993	JL. CRISTOPEL MIHING RT 006 RW 006 KEL. BAAMANG TENGAH KEC. BAAMANG	RUMAH	ANAK	6202051612090025		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
38	YUDHI PEPISANTO	3577010811800001	L	MADIUN, 08-11-1980	JL. DWI JAYA VII/15 RT 032 RW 007 DESA KLEGEN KEC. KARTOHARJO KOTA MADIUN LUAR KOTIM	RUMAH	ANAK	3577010808160001		BELUM KAWIN	WIRASWASTA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
39	RUMIYATI	6202014703890003	P	BAJARUM, 07-03-1989	JL. TILIK RIWUT RT 008 RW 002 KEL. KOTA BESI HILIR KEC. KOTA BESI	RUMAH	ISTRI	62020112110090003		KAWIN	IBU RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				
40	AMINAH	6209014204880001	P	BANJARMASIN, 02-04-1988	DESA BAKONSU RT 002 RW 00 KELURAHAN BAKONSU KECAMATAN LAMANDAU	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6209013108220003		CERAI MATI	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
41	NURDIN	6202050304830001	L	SAMPIT, 03-04-1983	JL. MUCHRAN ALI GG. SURYA SAMPIT RT 062 RW 002 KEL. BAAMANG TENGAH KEC. BAAMANG	RUMAH	ANAK	6202051805085601		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
42	NONI ARISKA	6207045503960001	P	WONOSOBO, 04-10-1996	DESA SUNGAI PAKIT, KAB. KOTA WARINGIN BARAT	RUMAH	ISTRI	6201062603150002		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
43	EKAWATI	6201064708860001	P	SAMPIT, 07-08-1986	JL. DESA SUNGAI PAKIT RT 017 RW 003 DESA SUNGAI PAKIT, KEC. PANGKALAN BANTENG KAB. KOBAR	RUMAH	ISTRI	6201063011220003		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				LUAR KOTIM
44	ABDUL MLIIS	6202061808700001	L	Sampit, 18/08/1970	Jl. IR. H. Juanda GG. Rambai 6 Sampit RT. 002 RW 002 Kel. Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202061905082675		KAWIN	BURUH HARIAN LEPAS	TUNA RUNGU				
45	CELINE WIDYA KHARISMA	6202067107080001	P	Sampit, 7/31/2009	Jl. Wengga Metropolitan 19 Jalur 10 No. 186 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang	RUMAH	ANAK	6202061905085897		BELUM KAWIN	PELAJAR	DISABILITAS FISIK				
46	YAHYA	6202021003680001	L	CEMPAKA MULIA BARAT, 1958-07-01	Jl. Cempaka Mulia Barat RT.3 Kec. Cempaga	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202021108220004	-	BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL	KELUARGA			
47	ABIL	6202020107650066	L	CEMPAKA MULIA BARAT, 7/1/1965	Jl. Yahya Usman RT.020 RW. 007 Kel. Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202021907220001	-	BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL	MASYARAKAT			
48	SARIANI	6202020209650001	L	Kotim, 9/2/1965	Jl. Yahya Usman RT.020 RW. 007 Kel. Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202020211210001		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
49	RAHMAD SALEH	6202060610990004	L	Bapanggang, 06-10-1999	Jl. H.M Arsyad Gg. SPG Sampit 016/004 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ANAK	6202060612100019		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
50	AMINAH	6202085304800004	P	Samuda, 4/13/1980	Jl. Sepihan Besar Kel. Samuda Kota RT.009 RW.003 Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	RUMAH	ANAK	6202082010200001		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				

51	MELKI PALAKA TARUNO	6202041708930003	L	Kolaka, 8/17/1993	Jl. Desa Jati Waringin RT.009 RW.003 Desa Jati Waringin Kecamatan Parenggean	RUMAH	ANAK	6202042506090001		BELUM KAWIN	BURUH HARIAN LEPAS	DISABILITAS MENTAL				
52	SELAMET	6202010603990002	L	Kota Besi,06-03-1999	Jl. Meranti RT.004 RW.002, Kel. Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi	RUMAH	ANAK	6202011805081322		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
53	MARIANI	6202064406660003	P	Sampit, 04-06-1966	Jl. Jend. Sudirman NO.25 RT.001 RW.001 Kel. Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ANAK	6202063011220014		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
54	LINDA	6202015707690001	P	Pagatan,17-07-1969	Jl. Iskandar RT.005/RW.002 Kel. Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi	RUMAH	ANAK	6202011805081478		BELUM KAWIN	PETANI	TUNA WICARA				
55	SIDADIARJO	3304170508450002	L	Banjar Negara,05-08-1945	Jl. Desa Jati Waringin RT.008 RW.003 Kecamatan Tualan Hulu	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202160202150002		KAWIN	PETANI	DISABILITAS FISIK				
56	NINA TRANIYANTI	6202045404960001	P	Garut,14-04-1996	Jl. Desa Sari Harapan RT/RW.011/01 Desa Sari Harapan Kecamatan Parenggean	RUMAH	ISTRI	6202040402210002		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
57	LESTARI HANDAYANI	6202064305770001	P	Sampit,03-05-1977	Jl. Perkutut 5 NO. 31 RT.008 RW.003 Kec. Kel. Sawahan MB. Ketapang	RUMAH	ANAK	6202062012100032		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
58	RIZAL	6202112903100020	L	Basawang, 05/07/1995	Jl. Samuda Ujung Pandaran RT/RW 006/002 Desa Regel Lestari Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	ANAK	6202112903100020		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS INTELEKTUAL				
59	RIZALISYAH	6202112106020001	L	Kotawaringin Timur, 21/06/2002	Jl. Samuda Ujung Pandaran RT/RW 007/002 Desa Regel Lestari Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	ANAK	6202112703100046		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS INTELEKTUAL				
60	INDARA	6202112703100046	L	Pembuang Hulu,14/08/2001	Jl. Samuda Ujung Pandaran RT/RW 007/002 Desa Regel Lestari Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	ANAK	6202111805080831		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS INTELEKTUAL				
61	TAUHUD	6202020107730050	L	Kotim,01/07/1973	Jl. Cilik Riwut Km.45 RT/RW 002/001 Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202020805082047		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
62	RIYAN	6202021805082208	L	Kotim,29/11/2003	Jl. Cilik Riwut Km. 42 RT/RW 002/001 Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202021805082208		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
63	ASRAR JERY RAMADHAN	6202080909080001	P	SAMUDA,12-01-1967	Jl. H.PADAT KARYA RT 020 RW 0022 DESA BASIRIH HILIR KEC. MENTAYA HILIR SELATAN	RUMAH	ANAK	6202081805084396		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
64	JUNAIDI	6202012212870002	L	Kandan,22/12/1987	Jl. Desa Kandan RT/RW 004/002 Desa Kandan Kecamatan Kota Besi	RUMAH	ANAK	6202010602100010		BELUM KAWIN	BURUH	DISABILITAS FISIK				
65	ROMAN	620205626002950001	L	Sampit, 25/02/1995	Jl. Usman Harun 4, RT/RW 006/002 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang	RUMAH	ANAK	6202051812100013		BELUM KAWIN	PENJUAL KORAN	TUNA NETRA				
66	ABDUL KHALIK	6202110107770005	L	Kotawaringin Timur,01/07/1977	Jl. Desa Parebok RT/RW 003/001 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202111805080120		KAWIN	PETANI	DISABILITAS FISIK				
67	MASRAYA	6202110112820001		Sebamban,31/12/1982	Jl. Samuda Ujung Pandaran RT/RW 005/002 Desa Regel Lestari Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	ANAK	6202111211120001		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS INTELEKTUAL				
68	SAPRIYA	6202024301860001		Kotim,03/01/1986	Jl. Cilik Riwut KM.45 RT/RW 008/005 Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202021805082522		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
69	MAYANG	6202026201070001	P	Luwuk Ranggan,22/01/2007	Jl. Cilik Riwut KM. 44 RT/RW 007/004 Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202021506120005		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
70	RUSMIATI	6202025803790003	P	Luwuk Ranggan, 18/03/1979	Jl. Jend Sudirman KM.89 Desa Sebabl Kecamatan Telawang	RUMAH	ISTRI	6202022401200003		BELUM KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS MENTAL				
71	RENI HALIMAH	6202015901780001	P	Kota Besi,19/01/1978	Jl. Cilik Riwut KM. 19 RT/RW 008/002 Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	RUMAH	ISTRI	6202011105100005		KAWIN	BURUH HARIAN LEPAS	TUNA RUNGU WICARA				
72	NOVI	6202014611950001	P	Kota Besi, 06/11/1995	Jl. Cilik Riwut KM. 19 RT/RW 008/002 Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	RUMAH	ANAK	6202011105100003		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS MENTAL				
73	ILUM	6202115202720001	P	Kotawaringin Timur, 12/02/1972	Jl. Keluarga RT/RW 003/001 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202111009120001		CERAI MATI	MENGURUS RUMAH TANGGA	TUNA RUNGU				
74	ROMILAH	62020255206810002	P	Ngawi, 12/06/1971	Jl. Cilik Riwut KM. 2,5 Gg. Adat Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang	RUMAH	ANAK	6202052510220002		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
75	NOVILIA	6202055408950003	P	Sampit,14/08/1995	Jl. M.Ali Gg.Pos Polisi RT/RW 023/007 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang	RUMAH	ANAK	6202050606110018		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
76	ANDRIANUS	6202041311760001	L	Sampit,13-11-1976	Jl. Brantas RT/RW 001/001 Desa Bukit Makmur Kecamatan Tualan Hulu	KELUARGA	KEPALA KELUARGA	6202160905220003		BELUM KAWIN	PETANI	DISABILITAS FISIK				
77	RAFA MAHYANI	6.20206E+16	P	Sampit,10-10-2012	Jl. Walter Condrat Gg. Suka Raja No. 22 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang	KELUARGA	ANAK	6202010802100002		BELUM KAWIN	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS FISIK				

78	ARZETI DEFARI	6202066309190002	P	Sampit,23-09-2019	Jl. Batu Berlian No. 105 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ANAK	62062061805082740		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
79	TURIAH	6202066007640002	P	Sampit,20-07-1964	Jl. Kamar XX Sampit RT/RW 005/002 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ISTRI	6202061805088788		KAWIN	PERDAGANGAN	DISABILITAS FISIK				
80	NURIANAH	6202075006640001	P	Bagendang Hilir,10-06-1964	Jl. Garuda RT/RW 003/001 Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara	RUMAH	ISTRI	6202071011100001		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
81	SRI MULYANI	6202064606760007	P	Sampit,06-06-1976	Jl. HM.Arsyad Jl. Kaca Piring 3 RT.017 RW 004 Kel. Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ISTRI	6202060408080020		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
82	IRMA WAHYUNI	6202075801900001	P	Kotawaringin Timur,18-01-1990	Jl. Garuda RT/RW 003/002 Desa Bagendang Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Utara	RUMAH	ISTRI	6202071405090010		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
83	HIDAYATUL MARISA	6202074103010002		Babirah, 01-03-2021	Jl. Binjai RT/RW 003/001 Desa Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara	RUMAH	ISTRI	6202071409170003		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
84	WAHIDAH	6202115107760001	P	Sapihan,01-07-1976	Jl. Samuda Ujung Pandaran Kecamatan Desa Regel Lestari Teluk Sampit	RUMAH	ISTRI	6202112903100050		KAWIN BELUM TERCATAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				
85	AMINAH	6202115101740001	P	Kotawaringin Timur,11-01-1974	Jl. Babbussuhada RT/RW 002/001 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH						DISABILITAS FISIK				
86	NORIYAH	6202114107730024	P	Parebok,1-07-1973	Jl. Babbussuhada RT/RW 002/002 Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit	RUMAH	ANAK	6202110401120042		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
87	IRWANSYAH	6474022703080005	L	Bontang,27-03-2008	Jl. Iskandar No.33 Kel. MB Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	ANAK	6202051805083429		BELUM KAWIN	PELAJAR	DISABILITAS FISIK				
88	ISMAIL	6202121104950002	L	Batuah, 11-04-1995	Jl. Desa Batuah RT.003 Desa Batuah Kecamatan Seranau	RUMAH	ANAK	6202121805081355		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
89	LEONARDI	6202021704000002	L	Luwuk Bunter,17-04-2000	Gg.Rajung RT/RW 01/01 Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga	RUMAH	ANAK	6202022806100014		BELUM KAWIN	BELUM BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
90	MUSTAPA	6301032803440001	L	SIKAWANG, 28-03-1944	Jl. SAMUDRA GG. BUNTU RT 004 RW002KEL. KOTA BESI HULU KEC. KOTA BESI	RUMAH	KELUARGA LAIN	6301032807100006		CERAI MATI	TIDAK BEKERJA	DISABILITAS FISIK				
JUMLAH TOTAL =90																
ANAK																
1	MUHAMMAD RIZKY YASIR	6202054703850007	L	Sampit, 01-10-2019	Jl. MANDUMAI NO.91 RT.011 RW.004 KEL. BAAMANG HILIR KEC. BAAMANG	Keluarga	Anak	6202052704210001		Belum Kawin	Belum Bekerja					
2	M. RIZAL	6202051808030003	L	Sampit, 01-10-2019	Jl. BAAMANG HULU RT.007 RW.002 KEL. BAAMANG HULU KEC. BAAMANG	Keluarga	Anak	620205060310001		Belum Kawin	Belum Bekerja					
3	ADITYA	6202011300600001	L	Sampit , 02-07- 2005	Jl. ISKANDAR RT.001 RW.001 KEL. KOTA BESI HILIR KEC. KOTA BESI	Keluarga	Anak	6202010401110003		Belum Kawin	Belum Bekerja					
4	RAMLI	6202011710070001	L	Camba, 13-06-2006	Jl. ISKANDAR RT.001 RW.001 KEL. KOTA BESI HILIR KEC. KOTA BESI	Keluarga	Anak	6202011102130003		Belum Kawin	Belum Bekerja					
5	FATUR RAHMAN	6202012012040001	L	Muara Dadahup, 17-10-2007	Jl. ISKANDAR GG. SEJAHTERA RT.001 RW.001 KEL. KOTA BESI HILIR KEC. KOTA BESI	Keluarga	Anak	6202011805080206		Belum Kawin	Belum Bekerja					
6	MUHAMMAD BAGUS SATRIO	6202041200050001	L	Kota Besi, 20-12-2004	Jl. PERUM PPKS PT. KABUAU DESA KABUAU KEC. PARENGGEAN	Keluarga	Anak	6202040203100004		Belum Kawin	Belum Bekerja					
7	LUISI SAPRILLIANI	6202014207070002	P	Kota Besi, 12-03-2005	Jl. PANGERAN DIPONEGORO RT.005 RW.002 KEL. KOTA BESI HILIR KEC. KOTA BESI	Keluarga	Anak	6202011805081443		Belum Kawin	Belum Bekerja					
8	MUHAMMAD RASYID	6202050110190001	L	Kotim, 02-07-2007	Jl. Cilik Riwet KM 4,5 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang	Keluarga	Anak	6202052301150002		Belum Kawin	Belum Bekerja					
9	FADIL MUHAMMAD AZIZ BIMBILAH	6202050807050005	L	Banteng, 06-07-2006	Jl. Taman Siwa 2 RT/RW 60/007 Kel. Baamang Hilir Kecamatan Baamang	Sendiri	KK	62020530111220003		Belum Kawin	Belum Bekerja					
10	FATHIYA ALINI AZAHRA	6202065304200001	P	Sampit, 13-04-2020	Jl. Tidar Raya I GG.Rambutan 2 No.208 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang	Keluarga	Anak	6202052710200002		Belum Kawin	Belum Bekerja					
11	ARINI SAFITRI	6202064206100004	P	Sampit, 02-06-2010	Jl. Nanas 2 No.44 Komplek Yuka RT 030 TW.008 Kel. Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Keluarga	Anak	6202060502180002		Belum Kawin	Belum Bekerja					
12	AHMAD GIYO	6202072007070002	L	Ramban, 20-07-2007	Jl. Binjai I RT.07 Kel. Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	Keluarga	Anak	620207151120002		Belum Kawin	Belum Bekerja					
13	REHAN	6202131308130002	L	Kotim, 13-08-2013	Jl. Desa Sudan RT/RW.004/002 Desa Sudan Kecamatan Cempaga Hulu	Keluarga	Anak	6202131805082862		Belum Kawin	Belum Bekerja					

14	INTAN SUHERLAN	6202056610200002	P	Kotim, 25-10-2020	Jl. CRISTOPEL MIHING GG. TAUHID KEL. BAAMANG HILIR KEC. BAAMANG			6202052601100007	Panti Asuhan Bahagia	Belum Kawin	Belum Bekerja					
JUMLAH TOTAL = 14																
LANJUT USIA																
1	BAMBANG	6202060607580001	L	Madiun, 06-07-1958	Jl. Jend. Sudirman Km.8 RT 10 RW04 Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang		KEPALA KELUARGA	6202061805089975	Barak	ceraI mati	Buruh					
2	WELLEM YOHANES	6202062812470001	L	Pualau Rote NTT,25-12-1947	Jl. Ir. H. Juanda Sampit RT.03 Rw.003 Kel. Ketapang Kec. MB. Ketapang	Sendiri				Kawin	Tukang Kayu					Meningga l
3	AMIRUDIN	6202050107530012	L	Makasar,01-07-1953	Jl. Bumi Raya I Rt.1 RW.1 Kel. Baamang Barat Kec. Baamang	Sendiri		6202052308230005	Panti Jompo Tangkiling	Belum kawin	Tidak Bekerja					
4	MULYANI	6202060707620003	L	Kotim, 07-07-1952	Jl. Muara Betang Kel. Pasir Putih Kec. MB. Ketapang	Sendiri		62020625102230011	Panti Jompo Tangkiling	Belum kawin	Tidak Bekerja					
5	HANG AMOY	6202064107430021	P	Tanah Putih, 01-07-1943	Jl. Delima 04-06- Sampit, RT.070 RW.004 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. MB. Ketapang	Sendiri		6202060102130005	Panti Jompo Tangkiling	Belum kawin	Tidak Bekerja					
6	SYAHRUL	6202062007540003	L	Sampit, 20-07-1954	Jl. Kopi Selatan Sampit, RT.021 RW.002 Kel. Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Keluarga	KEPALA KELUARGA	6202061805085337	Kawin	Petani	Tuna Rungu	Keluarga				
7	ASLIAH	6202015512370001	P	Kota Besi, 15-12-1937	Jl. Diponegoro Gg. Famili Rt. 02 Rw.01 Kel. Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	Sendiri	KEPALA KELUARGA	6202012802170002		CeraI Mati	Tidak Bekerja	Keluarga				
8	SAINA	6202014805380001	P	Kobes,08-06-1938	Jl. Iskandar TR.005/RW.002 Kel. Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	Keluarga	KEPALA KELUARGA	6202010703230001		ceraI mati	Tidak Bekerja	Keluarga				
9	MUHAMMAD ZAIDI	6202050107580045	L	Kotim, 01-07-1958	Jl. Walter Condrad No. 39 RT.012 RW.004 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang	Sendiri	KEPALA KELUARGA	6202050805230010	Jalanan	Belum Kawin	Tidak Bekerja	Disabilitas Mental	Tidak ada mengurus			
10	SALASIAH	6202084610580001	P	Samuda,06-10-1958	Jl. Sapihan Besar RT.09 Rw.03 Kel. Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	Sendiri	KEPALA KELUARGA	620208201020001		Belum Kawin	Tidak Bekerja		Tidak ada mengurus			
11	HAYATI	6202044506620001	P	Parenggean,05-06-1962	Jl. Sabrani, RT.03 RW.01 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	Keluarga	KEPALA KELUARGA	6202040008230001		Kawin	Mengurus rumah tangga	Keluarga				
12	MASLAN SYAWAL	6202041911530003	L	Parenggean, 19-11-1953	Jl. Sabrani Rt. 03 RW. 01 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	Sendiri	KEPALA KELUARGA	6202040203100028		Kawin	Buruh harian lepas	Keluarga				
13	IJUMANTAN	6202046205460001	P	Parenggean 22-05-1946	Jl. Naim Desa Parenggean Kec. Parenggean	Keluarga		6202041102130004		CeraI mati	Tidak Bekerja	Keluarga				
14	MAR'AN	6202040107520007	L	Perenggean,01-07-1952	Jl. Naim Rt.016 Rw.003 Ds. Parenggean Kecamatan Parenggean	Keluarga		6202041805081466		Kawin	Petani	Keluarga				
15	RUSNA	6202067112450022	P	Sampit, 31-12-1945	Jl. Iskandar no. 25 Sampit, RT.008 RW.001 Kel. Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Keluarga		6202060708100009		Kawin	Petani	Keluaga				
16	HADRAH	6202064107500035	P	Negara,01-07-1950	Jl. Pangeran Antasari Gg. Negara No.47 Sampit Kel. Mentawa Baru Hulu Kecamatan Menatawa Baru Ketapang	Keluarga		6202061905084759		CeraI Mati	tidak Bekerja	Keluarga				
17	NORSILA	6202065006590001	P	Sampit, 10-06-1959	Jl. Ir. H. Juanda XIV Sampit RT/RW 002/002 Kel. Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Sendiri		6202061905082662		Kawin	Mengurus rumah tangga	Keluarga				
18	AMAT	6202051009720004	L	Negara,10-09-1972	Jl. Muchran Ali Gg. Mandiri RT/RW 011/003 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang	Keluarga		6202050211100015		Kawin	Buruh harian lepas					
19	JUWITA	6202055004550001	P	Sampit, 10-04-1955	Jl. Muchran Ali No. 53 Sampit, RT/RW 009/003 Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang	Sendiri		6202051008090002		CeraI mati	Mengurus rumah tangga	Keluarga				
20	NURIENAH	6202055803600003	P	Sampit, 18-03-1960	Jl. Muchran Ali Gang Sari Nama No.48 RT/RW 057/006 Kel. Baamang Hulu Kecamatan Baamang	Keluarga		6202051805083990	Barak	CeraI Mati	Guru	Keluarga				
21	SALBIAH	6202012903450001	P	Kota Besi, 29 -03-1945	Jl. Iskandar RT/RW 006/002 Kel Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	Sendiri		62020111600001		CeraI Mati	Tidak bekerja	Keluarga				
22	BURHAN	6202080701420001	L	Samuda Kota, 07-01-1942	Jl. Samuda Kota Kel. Samuda Kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	Sendiri		6202080761420001		CeraI mati	Tidak bekerja	Keluarga				
23	SYAHRANI	6202052205610001	L	Sampit, 22-05-1961	Jl. Waltercondrat GG. Bani Muhammad RT.040 RW.007 Kel. Baamang Tengah Kecamatan Baamang	Sendiri	KEPALA KELUARGA	6202081805080387		CeraI mati	Petani	Keluarga	11			
24	MASRAYA	6202064107420023	P	Sampit, 01-07-1942	Jl. Iskandar II Sampit RT.001 RW.002 Kel. Mentawa Baru Hulu Kecamatan Menatawa Baru Ketapang	Sendiri		6202060911100020		CeraI mati	Mengurus rumah tangga	Keluarga				
25	AHMAD ROJANI	6202060607570003	L	Sampit,06-07-1957	Jl. Jembatan Kuning No.34 RT.038 RW. 002 Kel. Ketapang Kecamatan Menatawa Baru Ketapang	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202063005110020		Kawin	Tukang kayu	Keluarga				

26	BADRIANSYAH	6202050203610004	L	Sampit, 02/03/1961	Jl. Bumi Raya II RT/RW 015/001 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202051805083170		Kawin	Petani		Keluarga			
27	JUWADI	6202060507510003	L	Pelangsian, 05/07/1951	Jl. Pelangsian I RT/RW 014/006 Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH		6202061905080268		Kawin	Petani		Keluarga			
28	SYAMSU	6202020107420030	L	Cempaka Mulla, 01/07/1942	Jl. Cempaka Mulla Barat RT/RW 004/002 Desa Cempaka Mulla Barat Kecamatan Cempaga	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202021809100001		Kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
29	SYAHDAN	6202070408550001	L	Rubung Buyung,04/08/1956	Bagendang Tengah Ramban RT/RW 007/003 Desa Bagendang Tengah Kecamatan Mentaya Hilir Utara	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202071805081987		Kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
30	KADUT	6202041505590002	L	Sampit, 15/05/1959	Jl. Naim RT/RW 016/004 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202091805081447		Kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
31	HAMDIAN	6202040107540003	L	Parenggean,01/07/1954	Jl. Lesa Gg. Koramil RT/RW 004/001Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6204062801210001		Kawin	Nelayan		Keluarga			
32	SUDARTO	6202060306540001	L	Malang, 03/06/1954	Jl. Toman No.18 Perum.Batang Raya RT/RW.005/002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202061805086156		Kawin	Sopir					
33	SUKRANSYAH	6202691810580001	L	Bapinang Hulu,18-10-1958	Jl. Bapinang Pagatan RT/RW 002/001 Desa Bapinang Hulu Kecamatan Pulau Hanaut	RUMAH		6202091805080395		kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
34	UDIN	6202050107570003	L	Sampit, 01/07/1957	Jl. Muchran Ali Gg. Inpres RT/RW 051/006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang	Sendiri/Rumah	KEPALA KELUARGA	6202051805083658		Kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
35	ALIANSYAH	6202090109440001	L	Bapinang Hulu, 01/09/1949	Jl. Bapinang pagatan RT/RW 008/009 Desa Bapinang Hulu Kecamatan Pulau Hanaut	RUMAH		6202090904100004		Kawin	Tidak Bekerja		Keluarga			
36	ASLAH A	6202016005520001	P	Sampit,02/07/1950	Jl. Naim RT/RW 016/004 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	Sendiri/Rumah		6202011805081435		ceraI mati	Tidak Bekerja					
37	NURHAYATI	6202045507500004	P	Parenggean, 15-07-1950	Jln. Pelita RT. 006 RW.004 Kel. Parenggean Kec. Parenggean	RUMAH	KEPALA KELUARGA	620208141008001		CeraI Mati	Mengurus rumah tangga					tidak LayaK
38	SUMIATI	6202044405550001	P	Parenggean, 03/02/1953	Jl. Lesa RT/RW 013/003 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	Sendiri/Rumah		6202043006110001		Kawin	Tidak Bekerja					
39	IPAT	6202044302530001	P	Parenggean, 06/05/1957	Jl. Lesa Gg. H.Tiar Amin RT/RW 008/002 Desa Parenggean Kecamatan Parenggean	RUMAH		6202041805081217		Kawin	Tidak Bekerja					
40	RUSDIANA, H.T.A	6202044605570001	P	Basawang, 01/07/1955	Jl. Lisa Gg. Tiat Amin RT.006 RW.002 Kel. Parenggean Kec. Parenggean	RUMAH		6202041805080899		Kawin	Tidak Bekerja					
41	NURSEHAT	6202114107550008	P	Soren, 15/01/1952	Jl.P.Diponegoro RT/RW 002/001 Kel. Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi	RUMAH		6202111805080598		Kawin	Tidak Bekerja					
42	SARIANI	6202015501520001	P	Sampit, 08/06/1951	Jl. Iskandar 19 Sampit RT/RW 005/002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang	Sendiri		6202012304100001		Kawin	Tidak Bekerja					
43	DIJUNAINAH	6202064806510001	P	Malang, 25/08/1962	Jl. Saudara Perum Graha RT/RW 040/014 Kelurahan Sawahan Kecamatan MB.Ketapang	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202061012100001		CeraI Mati	Tidak Bekerja	DISABILITAS FISIK				
44	ANI SUMIATI	6202066508620001	P	Kota Besi Hilir,20/05/1952	Jl. P. Diponegoro RT/RW 005/ Kelurahan Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi	RUMAH		6202061805083335		CeraI Mati	Tidak Bekerja					
45	HAMIDAH	6202084107510012	P	Samuda,01-07-1951	Jl. M.Ilimi RT/RW 002/001 Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	RUMAH	KEPALA KELUARGA	6202081410080061		ceraI mati	Tidak Bekerja					Meningga I
46	RAMINI	6202055005560001	P	Sampit,10-5-1956	Jl. Masjid Siratol Mustakim Gg. Sederek No. 50 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang			6202053005110003								
47	DARMATASIAH	1502087112370003	P	Sampit,31-12-1937	Jln. Muchran Ali Gg Darul Iman RT/RW 001/001 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang											
48	SYAMSU EFENDI	6202066309190002	L	Kotawaringin Timur,10-08-1954	Jl. Diponegoro Gg. Famili RT/RW 007/002 Kel. Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi			6202012709220002	Panti Jompo Tangkiling	Belum kawin	Tidak Bekerja					
49	SITI JULEHA	6202116610550003	P	Jejangkit, 26-10-1955	Jl. Mantri Abdullah Desa Regei Lestari Kecamatan Teluk Sampit			6202110211230002								
50	IJUMRAH	6202055208380001	P	Sampit,12-08-1938	Jl. Baamang Hulu I RT/RW 007/002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang	RUMAH	ISTRI	6202050608020006		KAWIN	MENGURUS RUMAH TANGGA	DISABILITAS FISIK				

JUMLAH TOTAL = 50

GELANDANGAN PENGEMIS

[illegible]

28	YOSA		L		InHutani Belakang Taman											
29	PUTRI		P		Jl. Juanda /Iskandar 19 Kec. MB. Baru Ketapang											
TOTAL = 29																

- Sumber Data:
- Hasil identifikasi DTKS
 - Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng

Kolom 3 : Diisi dengan NIK

Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir

Kolom 6 : Diisi dengan alamat

Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak

Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga

Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll

Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga

Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan

Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah

Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas

Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus

Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan

Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran

Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

Sampit, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



H. SWHONO, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199403 1 013

IM. 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGE YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS)

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISBILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PEGEMIS	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	BAAMANG	BAAMANG BARAT			2				2			
			BAAMANG HILIR			3	1		4	2	5		
			BAAMANG HULU						1	3			
			BAAMANG TENGAH	4		4							
			TANAH MAS			1			1	4			
2		MENTAWA BARU KETAPANG	PELANGSIAN			1					1		
			MENTAWA BARU HILIR	1		1	1		1	2	11		
			MENTAWA BARU HULU	1		2				3	8		
			SAWAHAN	1		1				1			
			KETAPANG	1		2				4	5		
			BANGKUANG MAKMUR			1							
			PASIR PUTIH	1						3			
3		TELUK SAMPIT	REGEI LESTARI	1	4					1			
			PAREBOK	3			1						
4		SERANAU	GANEPO				1						
			BATUAH	1									
5		BUKIT SANTUAI	TEWEI HARA				1						
6		CEMPAGA	CEMPAKA MULIA BARAT	1			2				1		
			LUWUK RANGGAN	1			3						
			LUWUK BUNTER	1									
7		CEMPAGA HULU	PANTAI HARAPAN				1						
			SUDAN							1			
8		KOTA BESI	KOTA BESI HULU	1			1		2		5		
			KANDAN	1									
			KOTA BESI HILIR				3	1		4	1		
9	MENTAYA HILIR UTARA	BAGENDANG TENGAH							1	1			
		BAGENDANG HILIR	3			1							
10	MENTAYA HULU	KUALA KUAYAN				1							
		TANJUNG JARIANGAU				1							
11	PARENGGEAN	KABUAU	1						1				
		JATIWARINGIN				1							
		PARENGGEAN								11			
		SARI HARAPAN	1										
12	PULAU HANAUT	BAPINANG HULU								2			
		BAPINANG HILIR LAUT				1							
			SAMUDA KOTA	1						2			

13		MENTAYA HILIR SELATAN	BASIRIH HILIR	1		2					
			JAYA KELAPA						1		
14		TELAWANG	SEBABI			3					
15		TUALAN HULU	BUKIT MAKMUR	1		1					
			JATIWARINGIN	1							
16		ANTANG KALANG	GUNUNG MAKMUR			1					
17		TELAGA ANTANG	BERINGIN AGUNG			1					
			TUMBANG MANGKUP			1					
LUAR KOTIM						8	1				PPKS LUAR KOTIM
TOTAL = 183				28	4	52	5	1	14	50	29

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri valli dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota
3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima pelayanan di Luar Panti Sosial dan/atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupun Masyarakat

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar (disabilitas ganda) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar (disabilitas ganda) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar (disabilitas ganda) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Kolom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan

Sampit, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



H. WIPONO, S.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199403 1 013

FORM. 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/E PIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kabupaten Kotawaringin Timur			525								46				2021
2				228								102	7			2022
3				0								65	0			2023
TOTAL				753								213	7			

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
 Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
 Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
 Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
 Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
 Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

Sampit, Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



H. WIYONO, S.E
Pembina Utama Muda
 NIP. 19671010 199403 1 013

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM SOSIAL)

KABUPATEN: KOTAWARNGIN TIMUR

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, dan pengemis di luar panti									
1	UMI PURWATI	Pekerja Sosial	Kecamatan Kota Besi	ASN				Pemeintah Kab. Kotim	
2	RAHMADIANSYAH AR	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kab.Kotim		Masyarakat	Kementrian Sosial (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial)			
3	AGUNG SYAHID RAHMAN	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Telawang		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
4	SRI RAHAYU	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Seranau		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
5	MUSLIMAH TUS'ADIAH	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Kota Besi		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
6	ALFIANUR	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Cempaga		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
7	RAHMAT FAUJI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Mentaya Hulu		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
8	FERRY	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Parenggean		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
9	SITI SRI SUWARNI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Baamang		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
10	WAHYUDI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan MB. Ketapang		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
11	HENDRI WIJAYA	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Mentaya Hilir Utara		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
12	ABDUL AZIS	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
13	RIZKY SETIADI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Antang Kalang		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
14	AKHMAD ZULKIPLI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Teluk Sampit		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
15	AGUS YADI	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Cempaga		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
16	KRISTIAN	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Bukit Santuai		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
17	ANDREA IRAWAN	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan Tualan Hulu		Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
Total = 17 Orang									
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana									
1	ANANG	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
2	AYU ANNISA, S.P.d	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
3	DIAN HASAN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
4	DODY HARIYANTO	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
5	EDWIN SALEH	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
6	EKO NUR S, SE	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
7	HUSNI MUBARAK	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
8	IZZATUN HAFIDZUDDIN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
9	JAM'AN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
10	JULKANSYAH	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
11	M. ALEXANDER, S.Pd	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
12	M. ZAINI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
13	MILDA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	

14	MUKHLAN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
15	NOOR ALFISYAHRI, S.Pd	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
16	NOOR INSAN MU'MIN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
17	PUSPA KRISTINA	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
18	RAHMAT YULIANOOR, S.Pd	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
19	ROBI AGUSTRIYANTO	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
20	SAMUDI NOOR.H.M	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
21	SIAMSYAH	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
22	SITI HAMDANAH	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
23	SRI MULYATI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
24	SUARJITO	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
25	WELJA. J.S TOROH	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
26	YOPI EL YUDIRAHMAN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
27	YUNIARTI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
28	YETNAWATI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
29	SUPRIADI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
30	DIDIK SUPRIATIN	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
31	SAMSURI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
32	ELLY HENDRIAWATI	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Total = 32 Orang		

KECAMATAN

	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	
	Masyarakat			Pemeintah Kab. Kotim	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos
Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas
Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

Sampit, Januari 2024



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

H. WIYONO, S.E
Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199403 1 013